

Baca laporan dari pengungsi Timor Lorosa'e di Timor Barat, halaman 10.

Meninjau Kembali Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Lorosa'e

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), meskipun bersifat sementara merupakan salah satu lembaga terbesar Timor Lorosa'e. Banyak masyarakat berharap CAVR bersama-sama dengan sistem peradilan formal dapat berperan secara kritis dalam masa transisi, dari masa perang ke masa damai, dari pendudukan negara asing ke masa demokrasi yang independen, di Timor Lorosa'e. Meskipun semua komisaris adalah orang-orang Timor Lorosa'e, banyak staf yang menduduki jabatan-jabatan terpenting, semua dana, dan struktur dan metodologi pokoknya berasal dari luar negeri. Komisi mencoba mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa-peristiwa penting dari tahun 1974 hingga 1999, untuk menegosiasikan persetujuan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku kejahatan ringan, dan menyediakan sebuah mekanisme untuk mengakui dan menghargai penderitaan para korban selama perang sipil 1975 dan pendudukan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e. CAVR dengan semua pekerjaan dan rencana-rencananya diselesaikan pada pertengahan tahun 2004.

Mandat *La'ó Hamutuk* adalah menghasilkan laporan mengenai lembaga-lembaga internasional, dan CAVR terutama masyarakat Timor Lorosa'e, dengan komisaris Timor Lorosa'e dan lebih dari 90 persen staf Timor Lorosa'e.

Akan tetapi, lembaga ini masih mengandalkan para konsultan, penasihat, dan kepemimpinan staf internasional. Lebih jauh, CAVR didanai oleh lembaga donor internasional, dan kerja CAVR berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan dukungan yang luas dari internasional. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e juga merupakan tanggung jawab internasional. Artikel ini melihat lebih dalam struktur, kerja, dan mandat CAVR, juga Komisi di masa-masa sebelumnya (Baca *Buletin La'ó Hamutuk Vol. 2 No. 6-7*), dan saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengetahui seberapa baiknya Komisi memenuhi harapan yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat internasional dan Timor Lorosa'e.

Latar Belakang CAVR

CAVR ini didirikan berdasarkan Regulasi UNTAET No. 10/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2001. CAVR memiliki tiga wilayah kegiatan, dengan tujuan untuk menyebarluaskan nilai-nilai hak asasi manusia di Timor Lorosa'e. Pada awalnya, Komisi ini bekerja selama dua tahun dan diberikan perpanjangan waktu enam bulan. Ketika CAVR menyelesaikan tanggung jawabnya pada tahun 2004,

(Lanjutan ke halaman 3)



Daftar isi:

Editorial: CAVR dan Keadilan	2
Pengungsi Timor Lorosa'e di Timor Barat .	10
Berita Singkat	15
Lokakarya Bank Pembangunan Asia tentang Pemerintahan yang baik	16
Editorial: Swastanisasi dan Keuntungan	20

Editorial dari *La'o Hamutuk*: CAVR dan Keadilan

Menurut Patrick Burgess, mantan Direktur UNTAET untuk Hak Asasi Manusia dan sekarang menjabat penasihat hukum untuk para komisaris nasional, "Kita harus mencari keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e kapanpun ketika hal ini memungkinkan. Untuk mencari keadilan terdapat sejumlah kesempatan. Kesempatan tersebut melibatkan kemungkinan pengadilan internasional, Pengadilan Ad Hoc di Jakarta, Proses Kejahatan Serius, dan CAVR. Pendapat pribadi Saya, kita harus mengejar setiap kemungkinan kesempatan untuk mencapai keadilan yang kita cari." Patrick menekankan bahwa terdapat kesulitan politik dengan pendirian pengadilan internasional, dan Pengadilan Ad Hoc di Indonesia merupakan ke-pura-puraan. Unit Kejahatan Serius mempunyai masalah dan sekarang lebih efektif, tetapi tidak mempunyai akses kepada para pelaku utama di Indonesia. Pada sisi lain, dia melihat bahwa proses Rekonsiliasi Komunitas Masyarakat CAVR sukses secara relatif, meskipun Rekonsiliasi Komunitas Masyarakat hanya menangani para pelaku kejahatan ringan, dimana para korban juga menginginkan bersuara dan kesempatan untuk memulihkan martabat mereka. Pencarian kebenaran sebagai bagian dari kerja CAVR adalah menyelidiki kejahatan serius, juga pelanggaran hak asasi manusia lainnya, dan Patrick mengharapkan bahwa laporan akhirnya akan memasukkan rekomendasi-rekomendasi mengenai pelanggaran tersebut dan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran itu.

La'o Hamutuk percaya bahwa sebuah pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e seharusnya tetap didirikan. (Baca *Editorial, Buletin La'o Hamutuk Vol. 4, No.2*). Pertanyaannya adalah apakah anggota-anggota PBB mempunyai kemauan untuk memprakarsai berdirinya pengadilan internasional? Pengadilan internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Timor Lorosa'e sendiri, tetapi juga tanggung jawab dari masyarakat internasional, terutama PBB, tidak hanya karena kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar hak asasi manusia universal, dan karena kejahatan-kejahatan yang terjadi selama masa referendum 1999 merupakan pelanggaran secara langsung terhadap perjanjian yang ditandatangani Indonesia dengan PBB.

Pada tahun 2000, pada saat pembentukan CAVR sedang diusulkan dan didiskusikan, terdapat dukungan yang lebih kuat untuk mendirikan pengadilan internasional hingga saat ini, tetapi CAVR dan

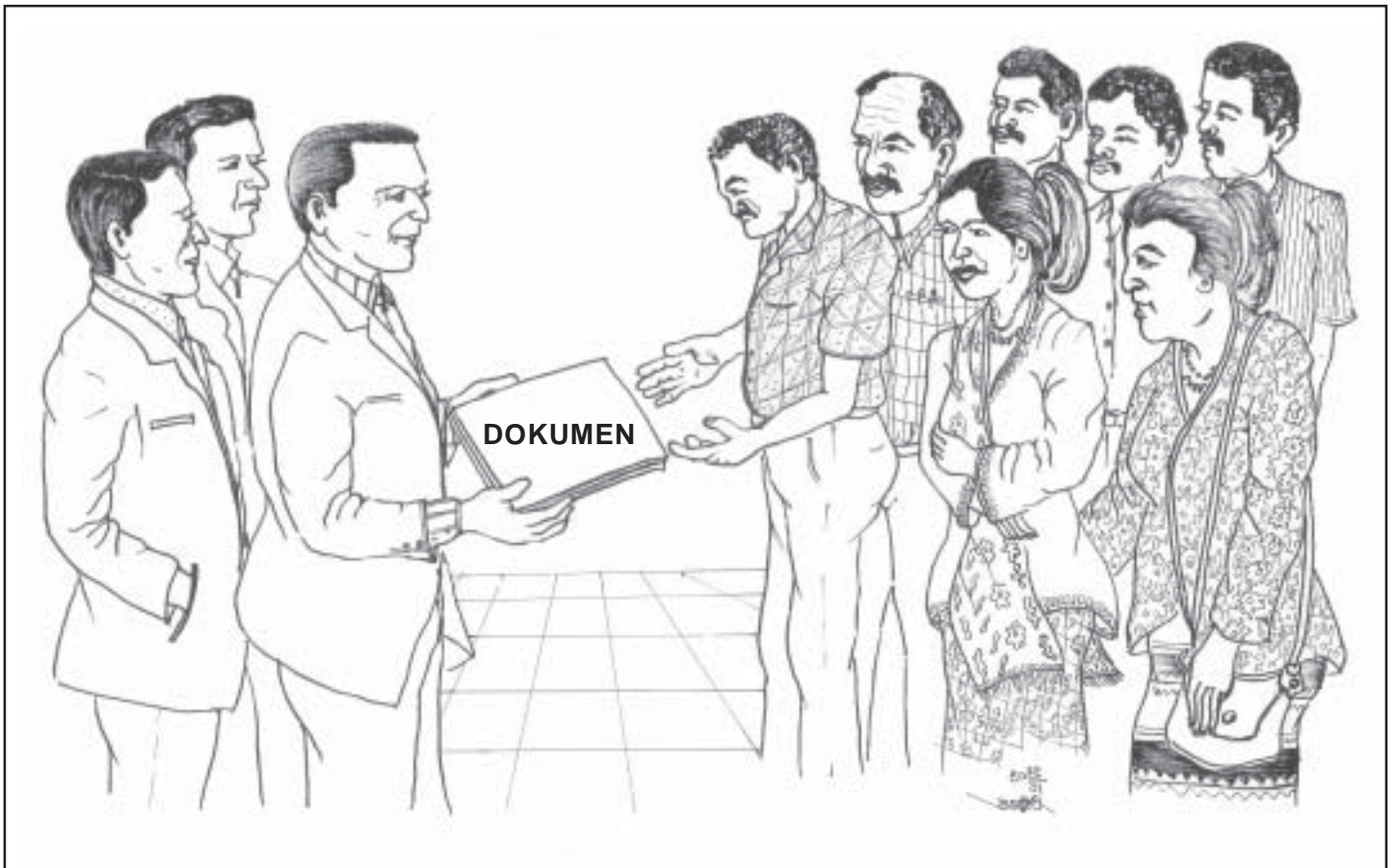
Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Indonesia merestui masyarakat internasional untuk menundanya. Para politisi dan diplomat mengklaim bahwa proses-proses tersebut, dalam beberapa jalan, menangani kebutuhan tekanan terhadap keadilan. Saat ini, tiga tahun kemudian, kemungkinan terhadap keadilan internasional lebih lemah, meskipun sebagian besar dari para pelaku masih menikmati kekebalan hukum di Indonesia.

Banyak orang merasa bahwa proses rekonsiliasi kejahatan-kejahatan ringan oleh CAVR mengalihkan perhatian dari tuntutan keadilan para korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun keadilan restoratif yang melibatkan para pelaku kejahatan ringan memberikan manfaat, hal ini tidak menghentikan kekebalan hukum bagi mereka yang melakukan dan mengarahkan kejahatan-kejahatan serius, banyak dari mereka mengulangi tindakan kejahatan ini di Aceh, Papua Barat, dan tempat-tempat lain di Indonesia.

Kami prihatin bahwa PBB, lembaga-lembaga dana, atau pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa'e telah dan akan menggunakan CAVR sebagai alasan pemaaf untuk tidak mendorong tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat, meskipun kejahatan-kejahatan berat tersebut berada di luar cakupan Komisi. Sebagai sebuah pemerintah baru, yang menghadapi persoalan anggaran serta tuntutan dan desakan (baik dari masyarakat nasional dan internasional) dapat didekati secara persuasif untuk menurunkan prioritas keadilan yang berlaku, khususnya karena terbatasnya sumber daya dan pengalaman.

Dalam laporannya, Bulan Juli 2001 mengenai Keadilan, Amnesty International menyambut baik ketentuan kewenangan CAVR untuk mengalihkan kasus-kasus Kejahatan Berat kepada Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, Amnesty "sangat meragukan kemampuan yang dimiliki sekarang akan mampu memproses kasus-kasus secara efektif dan dalam waktu yang memadai." Dalam kondisi ini, terdapat keprihatinan bahwa CAVR menggunakan sumber daya politik dan keuangan yang bisa saja telah dialokasikan untuk sistem peradilan, meskipun mengurangi beban pengadilan merupakan salah satu alasan didirikannya Komisi. (Baca *Buletin La'o Hamutuk Vol. 2 No. 6 & 7*).

Kami percaya bahwa laporan akhir CAVR akan mendukung keadilan dengan menyediakan informasi baru dan menekankan kembali kepada masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban hukum dan moral mereka dengan membuat para pelaku kejahatan serius bertanggungjawab, dengan cara menyediakan bantuan bagi ribuan korban.



CAVR akan menyerahkan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah. Satu rekomendasi yang dimungkinkan, dimana *La' o Hamutuk* akan memberikan dukungan, adalah penciptaan sebuah sistem resolusi konflik alternatif terhadap kejahatan ringan dan keluhan-keluhan, kemungkinannya mirip dengan proses rekonsiliasi masyarakat yang digunakan oleh CAVR.

Mandat-mandat Komisi, termasuk:

- 1. Pencarian Kebenaran:** Komisi akan mencari kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e antara tahun 1974 hingga 1999. Komisi akan membuat sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran bagi para korban dan pelaku untuk menjelaskan, mengakui, dan merekam pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.
- 2. Rekonsiliasi Komunitas Masyarakat:** Komisi akan memfasilitasi rekonsiliasi komunitas dengan menangani kejahatan ringan seperti perampasan, pembakaran, dan penyerangan ringan. Pada masing-masing kasus, sebuah Panel yang terdiri dari Komisaris Wilayah dan para pemimpin lokal akan mengadakan mediasi antara para korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan rekonsiliasi yang akan dilakukan oleh pelaku.
- 3. Rekomendasi kepada Pemerintah:** Komisi akan melaporkan hasil temuannya dan membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk tindakan selanjutnya dan penyebarluasan hak asasi manusia.

Ide dasar untuk mendirikan CAVR didiskusikan di Kongres CNRT di tahun 2000, pada saat itu Komisi dikenal sebagai Komisi Penerimaan dan Rekonsiliasi. PBB telah

mendiskusikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Timor Lorosa'e, dan PBB terlibat sejak awal secara serius, mengadakan konsultasi dengan mendatangkan International Center for Transitional Justice (Lembaga Internasional untuk Keadilan di Masa Transisi) dan lain-lain. Selanjutnya, CNRT mengadakan workshop yang mengikutsertakan peserta dari Perkumpulan Mantan Tawanan Politik (ASEPOL), ET-WAVE, FOKUPERS, Yayasan HAK, PAS-Justice, UNHCR, Legal Affairs UNTAET, Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, dan CNRT.

Menurut Jacinto Alves, salah satu anggota komisaris nasional, komisi ini penting karena dapat membantu menyelesaikan kejahatan ringan, melalui proses rekonsiliasi masyarakat. Pengadilan sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua kejahatan ringan, dan jika tidak ada CAVR, semua kasus kejahatan ringan tersebut mungkin tidak akan terselesaikan.

Komisi-komisi kebenaran telah menjadi resep yang populer untuk rekonsiliasi di beberapa masyarakat pasca konflik. CAVR merupakan komisi ke duapuluh-satu setelah komisi-komisi yang sejenis di Afrika Selatan, Peru, Ghana dan Sierra Leone dan negara-negara lain. Pada Bulan Juli, staf CAVR dan seorang komisaris berpartisipasi dalam sebuah konferensi di Peru, bertukar pengalaman dengan komisi-komisi dari Peru, Sierra Leone, dan Ghana, untuk memperbaiki manajemen CAVR di Timor Lorosa'e.

Banyak komisi-komisi di lain tempat telah mencampuradukkan hasil-hasil kerja mereka, seringkali karena para pelaku tidak sepenuhnya bekerjasama, atau karena penemuan-penemuan mereka membuat para pejabat pemerintah tidak nyaman yang kemudian memberikan tekanan terhadap laporan-laporan mereka atau menolak melaksanakan

rekomendasi-rekomendasi dari laporan tersebut. Di beberapa negara, para komisaris atau staf telah diintimidasi atau diteror sebagai usaha untuk mencegah komisi melakukan pekerjaan mereka. Untungnya, CAVR Timor Lorosa'e tidak mengalami intimidasi, dan kita masih berharap bahwa pekerjaan mereka akan selesai dengan sukses, dan penemuan-penemuannya dipublikasikan secara luas dan dipatuhi.

Kebanyakan dari para penasihat dan konsultan internasional yang terlibat dalam pendirian CAVR di Timor Lorosa'e memiliki pengalaman yang sedikit dengan komisi-komisi di negara-negara lain. Beberapa dari mereka yang berpengalaman, bekerja dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan. Tetapi setiap situasi negara berbeda, dan situasi Afrika Selatan berbeda dengan Timor Lorosa'e dalam beberapa kondisi:

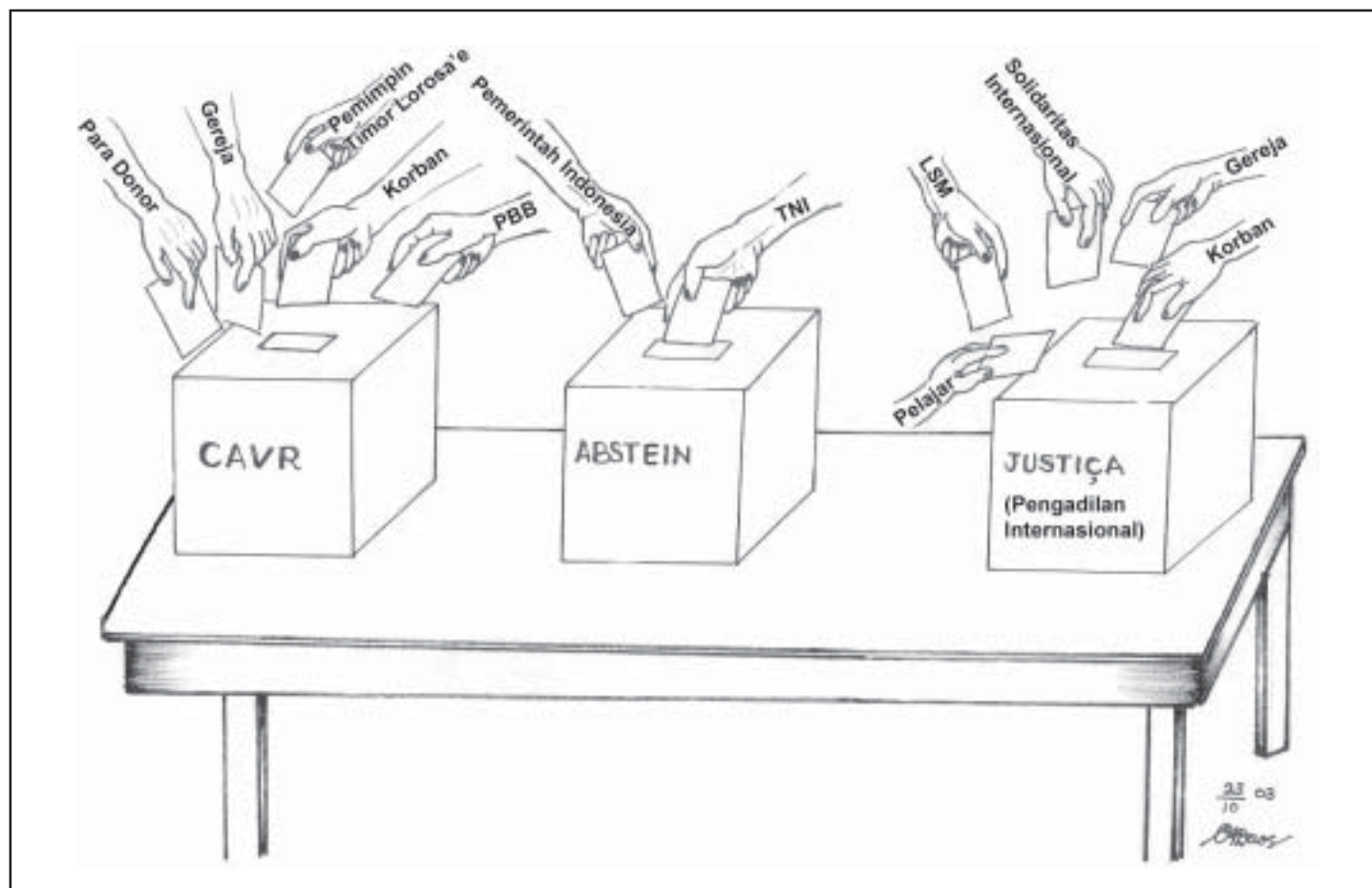
- Para pelaku utama kejahatan serius masih berada di Afrika Selatan, tetapi telah dijatuhkan dari kekuasaan. Di Timor Lorosa'e, para pelaku utama menerima perlindungan di Indonesia, dan kebanyakan dari mereka masih memegang kedudukan tingkat tinggi di lembaga militer dan Pemerintah Indonesia.
- KKR didirikan untuk melaksanakan program amnesti yang telah disetujui antara masyarakat kulit putih mantan pembuat keputusan dan gerakan pembebasan. Di bawah wewenang KKR, amnesti diberikan kepada setiap orang, termasuk para pelaku kejahatan serius yang memberikan pengakuan penuh dan jujur di depan CAVR. CAVR tidak mempunyai kewenangan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan serius.
- Afrika Selatan berpenduduk 50 kali lebih banyak dan mempunyai tanah yang lebih luas dibandingkan Timor Lorosa'e. Tetapi, kedua KKR dan CAVR memiliki jangka

waktu dan besaran organisasi yang sama, 2-3 tahun dengan 300 staf.

Pembentukan CAVR di Timor Lorosa'e didasarkan pada asumsi bahwa membuat kebenaran untuk diketahui oleh siapapun, mengenai siapa yang melakukan, apa yang dilakukan terhadap siapa dalam konteks pelanggaran berat hak asasi manusia, dapat menjadi sebuah basis rekonsiliasi jangka panjang di dalam suatu masyarakat yang sedang memulihkan diri dari perang dan pelanggaran hak asasi manusia serius dan luas.

Salah satu fungsi terpenting Komisi Kebenaran ialah menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan menulis laporan lengkap, yang menunjukkan dan memaparkan tidak hanya kasus-kasus individual, tetapi juga pola dan kebijakan yang mendasari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Laporan tersebut akan berdasarkan terutama pada kesaksian para korban dan penelitian yang dilakukan di Timor Lorosa'e, ditambah dengan beberapa penelitian di negara-negara lain. Meskipun CAVR mencoba untuk mengumpulkan informasi dari militer Indonesia dan pejabat pemerintah, tetapi hanya terdapat sedikit kerja sama. Meskipun laporan tersebut akan bermanfaat, laporan tersebut tidak akan menjadi kebenaran yang lengkap dan obyektif, selama Komisi tidak mempunyai akses terhadap informasi atau titik pandang yang hanya dikendalikan oleh para komandan atau para pelaku utama.

Sebagai tambahan pada laporan tersebut, Komisi Kebenaran mencoba untuk menyebarluaskan dan memfasilitasi permintaan maaf kepada para korban – baik, kepada orang per orang dan masyarakat secara keseluruhan – oleh para pelaku kejahatan. Dalam hal ini, mereka melaksanakan keadilan restoratif dan membantu meningkatkan kemungkinan bagi para mantan musuh hidup berdampingan secara damai.



Struktur dan Proses Kerja CAVR

Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi, untuk isu yang bersifat politis berada di tangan para komisaris nasional: Aniceto Guterres Lopes (Ketua), Padre Jovito de Araujo (Wakil Ketua), Jacinto Alves (Unit Pencarian Kebenaran), Olandina Caeiro (Bendahara), Isabel Guterres (Unit Kebenaran/Dukungan terhadap Korban), Jose Esteveao Soares (Unit Pencarian Kebenaran), dan Rev Agostinho de Vasconcelos (Unit Rekonsiliasi). Beberapa dari para komisaris bekerja penuh waktu untuk CAVR, dan beberapa bekerja paruh waktu (part time). Masing-masing komisaris juga bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan CAVR di dua distrik, sehingga mereka sering mengadakan perjalanan ke luar Dili.

Dalam pengambilan keputusan, lima dari tujuh komisaris harus hadir. Beberapa anggota komisaris mengakui bahwa dalam hal tertentu para komisaris hanya diminta untuk menangani kebijakan-kebijakan politik yang penting, membuat mereka sulit untuk mengetahui pelaksanaan program. Akan tetapi, beberapa staf CAVR merasa bahwa beberapa komisaris seharusnya lebih pro-aktif untuk mengetahui pelaksanaan program di lapangan. Beberapa staf lokal CAVR juga mengatakan kepada kita bahwa para komisaris nasional seringkali terlambat dalam menyetujui kenaikan gaji, dan lambat dalam mengambil keputusan mengenai dengar pendapat umum. Pelaksanaan keputusan dan koordinasi kegiatan di lapangan ditangani oleh Tim Manajemen Senior (SMT), yang terdiri dari koordinator masing-masing divisi, Direktur Eksekutif Lucio dos Santos, dan program manajer Galuh Wandita.

Divisi Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK)

Melalui Divisi PRK, Komisi menyebarluaskan rekonsiliasi di dalam masyarakat, dengan “menyebarkan penerimaan dan bersatunya kembali orang-orang yang telah menyebabkan kesengsaraan pada komunitasnya” dengan melakukan kejahatan ringan, seperti pencurian, serangan ringan, pembakaran, dan penghilangan persediaan kebutuhan hidup. PRK ini membuat para pelaku kejahatan-kejahatan seperti itu bertanggungjawab kepada korban, sebagai bentuk dari keadilan restoratif. Komisi melakukannya melalui PRK, dengan mencari tahu apakah para pelaku berkehendak melakukan pemulihan dengan melakukan sesuatu yang berarti bagi para korban dan komunitas mereka. Misalnya, membakar sebuah rumah bisa diselesaikan dengan meminta pelakunya membangun kembali rumah tersebut. “Perjanjian Rekonsiliasi Komunitas” didaftarkan pada pengadilan distrik sebagai jaminan bahwa proses rekonsiliasi akan dilaksanakan, bahwa penghukuman telah sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan atau pada skala yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Komisi bertanggungjawab terhadap kejahatan serius (seperti pembunuhan, perkosaan, penghancuran massal dan perencanaan untuk melaksanakan kejahatan semacam itu), kepada Penuntut Umum untuk diproses melalui proses pengadilan.

SCU (Unit Kejahatan Berat) memeriksa pernyataan-pernyataan deponen yang diterima dari CAVR dan mendata para tersangka yang dipercaya telah terlibat dalam kejahatan berat pada tahun 1999. Hingga akhir Oktober, CAVR telah

mengirim 1115 pernyataan deponen kepada SCU, dimana 69 kasus yang diperiksa di bawah kewenangan/yurisdiksi eksklusif SCU. SCU tidak mengatakan kepada *La’o Hamutuk* jika mereka yang diduga keras sebagai pelaku kejahatan serius telah didakwa atau sedang dikejar secara aktif, tetapi hanya mengatakan bahwa semua kasus-kasus tersebut “dalam penyelidikan.”

Untuk kejahatan ringan, PRK berusaha membawa pelaku ke perjanjian rekonsiliasi dengan para korban dan/atau komunitas. Pertengahan Oktober 2003, Unit PRK telah menerima permintaan untuk mengadakan PRK dari 1100 lebih pelaku kejahatan ringan. Dari jumlah tersebut, 454 berpartisipasi dalam 82 dengar pendapat, 89% menghasilkan perjanjian rekonsiliasi masyarakat. Semua proses PRK dimasukkan dalam database PRK sebagai dokumentasi. Meskipun angka tersebut angka yang mengesankan dalam jangka waktu pendek, hal ini merupakan pemecahan kecil dari politik kejahatan ringan yang terjadi di Timor Lorosa’e. Pada akhir seperempat abad penjajahan Indonesia, misalnya TNI dan milisi membakar 10 ribuan gedung dan memaksa pindah ratusan ribu orang.

Pada prinsipnya, orang-orang memberikan kesaksian atas dasar kesukarelaan, meskipun salah satu dorongan bagi para pelaku bahwa dengan memasuki perjanjian PRK menjamin kekebalan hukum dari penghukuman terhadap kejahatan ringan yang merupakan topik utama dari perjanjian. Akan tetapi, beberapa korban tidak menginginkan memberikan kesaksian, karena mereka merasa tidak mempunyai keamanan hukum. Situasi ini terjadi karena para korban dan pelaku mengetahui bahwa CAVR dapat menyerahkan informasi yang diperoleh kepada pengadilan, yang dapat menjatuhkan hukuman jika suatu kasus diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan serius. Para mantan pendukung pro otonomi seringkali merasa takut untuk memberi kesaksian karena mereka berpikir hal tersebut akan membuka kembali luka lama dan akan berbahaya bagi mereka di tengah masyarakat yang pro kemerdekaan. *La’o Hamutuk* juga mempelajari bahwa beberapa para pelaku kejahatan ringan memberikan kesaksian karena secara tidak benar mereka percaya jika mereka tidak memberikan kesaksian, polisi akan datang ke rumah dan menangkap mereka. Banyak orang yang bingung dan tidak menyadari bahwa sistem pengadilan tidak mempunyai kemampuan untuk menghukum jenis kejahatan ringan bahkan jika PRK tidak dicapai.

Terdapat keprihatinan di dalam divisi ini bahwa tidak cukup staf di PRK, dan kerja yang berlebihan di distrik. Staf divisi PRK mengeluh bahwa seringkali mereka tidak menerima dukungan logistik yang cukup, contohnya staf di distrik-distrik harus jalan ke desa-desa yang berbeda-beda, tanpa transportasi motor. Kami juga mempelajari bahwa beberapa bagian proses PRK di Baucau mendapatkan banyak persoalan karena staf PRK tidak bekerja sebagai tim.

Divisi Pencarian Kebenaran

Divisi ini melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara 1974 dan 1999, dan akan menulis sebuah laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran ini dan faktor-faktor yang mengambil bagian dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini, Komisi tidak hanya menyelidiki pelanggaran hak asasi

manusia dengan berdasarkan kasus per kasus, tetapi juga memeriksa apakah pelanggaran- pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis. Untuk alasan ini, kasus-kasus yang diduga keras sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebagai bagian dari fungsi-fungsi penyelidikan Komisi.

Unit pengambilan pernyataan dari divisi ini mewawancarai para korban dan saksi, dan merencanakan mengumpulkan 8000 pernyataan. Mereka diperkirakan telah mengambil pernyataan sekitar 5900 di 51 subdistrik dari 65 subdistrik di Timor Lorosa'e.

Masing-masing distrik mempunyai empat pencatat pernyataan, dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Setiap staf dibekali formulir pertanyaan dan tape perekam. Mereka juga menulis sebuah narasi cerita dari apa yang didengar. Unit Hubungan Masyarakat menyebarkan informasi mengenai peran CAVR dan mengidentifikasi siapa yang akan diminta untuk membuat pernyataan. Pemberian pernyataan adalah sukarela.

Divisi Pencarian Kebenaran juga memasukkan Unit Penelitian dan Unit Pemrosesan Data, yang selanjutnya dibagi dalam dua tim: pembaca pernyataan yang membaca dan menandatangani nomer kode ke pernyataan-pernyataan, dan staf pemasukan data yang memasukkan informasi ke dalam database. Penelitian ini dibagi ke dalam sepuluh tema penyelidikan: pemindahan paksa dan kelaparan, pembunuhan massal, pembunuhan dan penghilangan, pemenjaraan dengan alasan politik dan penyiksaan, perempuan dan konflik, anak-anak dan konflik, konflik partai politik, TNI, Fretilin/Falintil, dan para pelaku internasional.

Dari 5.900 pernyataan yang telah dikumpulkan sejauh ini, lebih dari 2.000 telah dimasukkan ke dalam database. Database yang tertunda dan persoalan-persoalan lain telah membuat kesulitan penelitian sebagai bagian dari divisi Pencarian Kebenaran untuk menggunakan pernyataan untuk analisa mereka mengenai trend dan pola-pola; persoalan yang sama muncul di komisi-komisi kebenaran di seluruh dunia.

Melalui divisi Pencarian Kebenaran, CAVR melaksanakan penelitian mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan pembunuhan massal, genosida, dan pembunuhan lain yang bermotif politik antara tahun 1974 hingga 1999. Penelitian ini juga melibatkan para pelaku internasional, baik sipil maupun militer yang terlibat langsung maupun tidak langsung di Timor Lorosa'e, meskipun keseluruhan pernyataan tidak akan memasukkan secara mendetail mengenai keterlibatan internasional. Proses penelitian demikian sedang berlangsung dan data-datanya masih dirahasiakan. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti profesional, baik dari lembaga akademis maupun LSM.

Salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan perkiraan jumlah orang dibunuh secara akurat selama 24 tahun selama pendudukan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan "studi kematian retrospektif" yang menggabungkan informasi dari survei makam, wawancara, data demografi, dan sumber-sumber lain. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai ketepatan data awal, dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sulit dengan sempurna, menimbulkan kebutuhan lain. Apakah menghitung jumlah orang yang dibunuh tidak lebih penting daripada mengidentifikasi strategi, kebijakan, para pembunuh, dan dalang utama yang

melenyapkan hidup mereka.

CAVR telah mengadakan dengar pendapat di Timor Lorosa'e mengenai "Pemenjaraan karena Alasan-Alasan Politik", "Perempuan di Masa Konflik", dan "Kelaparan dan Pemindahan Paksa." Para korban dan ahli memberikan kesaksian-kesaksian, yang secara luas disiarkan di televisi dan media lain, berkaitan dengan fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman untuk membantu pemahaman publik secara luas mengenai realitas yang dihadapi oleh rakyat Timor Lorosa'e selama pendudukan Indonesia. Hingga tahun depan, dengar pendapat tambahan direncanakan mengenai "Konflik Politik 1974-1976", "pelaku internasional", "pembunuhan massal", dan kemungkinan topik-topik lain.

CAVR pernah mempertimbangkan untuk menyelenggarakan dengar pendapat di luar negeri (di Amerika Serikat, Australia, dan mungkin di Indonesia) untuk menyediakan kesempatan bagi para pembuat kebijakan dan ahli dari PBB dan negara-negara lain memberikan kesaksian mengenai peran pemerintah mereka dan peran mereka sendiri dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e antara tahun 1974 dan 1999. Sayang sekali, proyek ini telah dibatalkan, karena kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang tidak nyata. Tetapi beberapa orang ragu-ragu bahwa prioritas CAVR dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kemungkinan termasuk keengganan CAVR dan lain-lain untuk memermalukan pendukung internasional atas pendudukan Indonesia.

Isu-isu yang juga diangkat adalah berkaitan dengan hasil keseluruhan penelitian pencarian kebenaran, dan apakah laporan akhir mungkin akan diedit untuk memenuhi isu-isu politik nasional dan internasional. Banyak dari lembaga dan agen-agen donor internasional yang membuat pekerjaan CAVR menjadi mungkin merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pendudukan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e, baik secara aktif maupun pasif, dan mereka bisa saja tidak menginginkan adanya cerita yang lengkap mengenai keterlibatan mereka. Meskipun beberapa pelaku, khususnya militer Indonesia, akan menolak laporan tersebut karena penelitian semata-mata berbasis pada penelitian dari para peneliti dan saksi pro-kemerdekaan, persoalan ini masih penting untuk mencoba menjadikan laporan yang sedapat mungkin obyektif dan akurat. Penelitian ini menelan biaya yang tinggi, dan seharusnya tidak berakhir di lemari data atau keranjang sampah, tanpa menanggapi kebutuhan korban terhadap keadilan dan pengakuan.

Divisi Keuangan

CAVR mengundang Inspektur Jendral RDTL untuk melakukan audit dan selama ini telah dilakukan sebanyak dua kali, dan telah menemukan bahwa secara umum segala sesuatunya berjalan sesuai peraturan, meskipun terdapat sedikit permasalahan teknis. Untuk menghindari masalah-masalah teknis di kemudian hari, CAVR telah membuat daftar semua asset-asset besar dan kecil mereka. Bagian dari hal tersebut, Divisi Keuangan memutuskan untuk membatasi penggunaan pulsa telepon selular dan pengisian bahan bakar kendaraan. Sebagai tambahan, setelah \$1,145 hilang, kontrak kerja dua staf CAVR di Baucau telah diberhentikan.



Masalah lainnya dalam divisi ini adalah para staf lokal kurang berpengalaman dalam administrasi keuangan. Baru-baru ini, pengalihan keahlian dari staf internasional kepada staf lokal telah mulai meningkat.

beberapa konsultan dan staf yang dibayar secara langsung oleh bantuan bilateral seperti USAID, juga biaya yang berkaitan dengan program-program baru seperti Survei Kematian Retrospektif.

Rencana pengeluaran CAVR, 2½ tahun

Gaji	\$1.685.669
Biaya Pra-Komisi	\$31.770
Biaya kantor & program	\$836.703
Biaya asset	\$80.000
Biaya kendaraan	\$214.000
Pelatihan & Pendidikan Publik ..	\$250.130
Penelitian	\$102.800
Gedung (Kebanyakan untuk renovasi bekas penjara)	\$426.000
Kendaraan	\$302.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	\$238.000
Biaya Bantuan Korban	\$166.400
Laporan Akhir	\$96.300
Biaya Tak Terduga	\$120.900
Total Anggaran	\$4.550.672

Sumber: CAVR

Yang tidak termasuk dalam anggaran adalah biaya sebelas staf internasional penuh waktu yang dibayar dari PBB dan lembaga -lembaga PBB untuk bekerja di CAVR. Jika mereka menerima gaji rata-rata sama dengan staf internasional sipil UNMISSET, dukungan dana ini diperkirakan bernilai dua juta dolar. Juga tidak termasuk dalam anggaran adalah biaya

Dana yang telah diterima

Lembaga Dana	Jumlah (USD)
AusAid	\$160.711
Pemerintah Inggris (4 bantuan)	\$516.347
Kanada	\$190.076
Komisi Eropa (melalui UNHCR)	\$316.982
Finlandia	\$19.995
Jerman	\$218.956
Hivos	\$34.249
Irlandia (3 bantuan)	\$311.829
Jepang (2 bantuan)	\$764.681
Selandia Baru	\$292.091
Norwegia	\$252.838
UNDP-Swedia	\$191.250
USAID	\$5.191
USAID (dalam bentuk barang) ..	\$117.547
U.S. Institute for Peace (2 bantuan)	\$40.000
Bank Dunia Proyek Penguatan Komunitas (CEP)	\$80.000
Total	\$3.512.743

Dana yang dijanjikan tetapi belum diterima

Lembaga Dana	Jumlah
Irlandia	\$136.000
Jepang	\$235.000
UNDP-Swedia	\$100.295
USAID	\$12.009
USAID (dalam bentuk barang) ...	\$99.661
Bank Dunia-CEP	\$86.400
Total	\$669.665

Sumber: CAVR

\$3.5 juta dana telah diterima oleh CAVR, diperkirakan 63% direncanakan untuk bagian khusus dari kerja-kerja CAVR. \$670,000 dijanjikan tetapi belum diterima, 72% digunakan untuk proyek-proyek khusus. Kebanyakan dari dana-dana tanpa peruntukan, dimana CAVR bebas untuk mempergunakannya, diberikan oleh Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia.

Divisi Dukungan bagi Korban

Divisi Dukungan bagi Korban memfasilitasi kegiatan untuk memberikan kontribusi terhadap rehabilitasi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Divisi ini mengorganisir dukungan di tingkat pedesaan kepada mereka yang memberikan pernyataan dan ikut serta dalam rekonsiliasi komunitas, juga dengar pendapat para korban di subdistrik-subdistrik, diskusi-diskusi komunitas mengenai dampak kekerasan, dan workshop penyehatan bagi mereka yang bertahan hidup dari pelanggaran hak asasi manusia. Divisi Dukungan bagi Korban juga mencoba untuk menghubungkan mereka yang bertahan dengan kebutuhan yang penting dengan organisasi-organisasi yang dapat memberikan pelayanan kepada mereka, termasuk kepada Program Orang-Orang Rentan CEP. Sebuah kelompok kerja yang melibatkan Fokupers, Suster-suster dari Carmelita, Perkumpulan HAK di dalam pelaksanaan dari program penyerahan kepada para korban yang membutuhkan bantuan segera.

Untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh para korban, pihak CAVR menerima sekitar \$166,000 dari Program Penguatan Komunitas (CEP), untuk diberikan kepada para korban. Menurut informasi yang didapat oleh *La'o Hamutuk*, masing-masing korban mendapatkan \$200 dan banyak orang mengeluhkan bahwa pengalokasian dana yang dibagikan tidak transparan. CAVR meminta kepada para korban yang menerima uang untuk tidak mengatakan kepada korban lain, yang menambahkan persepsi bahwa pembagian dana ini bersifat diskriminatif dan nepotistik.

Pada akhir mandatnya, CAVR akan mengembangkan rekomendasi di sekitar pengembalian dan pemulihan para korban.

Divisi Pendukung Program (Sebelumnya Divisi Hubungan Eksternal/Hubungan Masyarakat)

Divisi ini mempunyai tiga unit: Media dan Informasi Publik, hubungan masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan. Unit pertama menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk kegiatan, antara lain:

- Program radio "CAVR Dalam ba Dame" (CAVR, the Road to Peace), yang disiarkan pada Radio Timor Leste dan stasiun radio lainnya;
- Brosur dan poster, menerangkan misi, visi, dan kegiatan CAVR;
- Konferensi Pers, siaran pers, dan hubungan-hubungan lainnya dengan media nasional dan internasional.

Unit Hubungan Masyarakat mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok di masyarakat Timor Lorosa'e, termasuk LSM, partai politik, gereja, organisasi pemuda dan perempuan. Di distrik terdapat satu staf hubungan masyarakat untuk mensosialisasikan kerja CAVR dan membantu mengidentifikasi para korban dan pelaku yang akan diminta untuk memberikan pernyataan, berpartisipasi dalam dengar pendapat, atau ikut serta dalam proses rekonsiliasi masyarakat.

Unit Pengembangan Kelembagaan mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan di dalam CAVR. Unit ini fokus kepada pengembangan kemampuan, menyelenggarakan pelatihan, dan membantu mengevaluasi kemampuan dan kualitas kerja staf.

Peranan Staf Internasional

Proposal CAVR yang disebarluaskan untuk konsultasi publik pada akhir 2000 menyatakan bahwa "ke depan, semua staf tetap adalah orang Timor Lorosa'e. Beberapa konsultan internasional sepertinya dikontrak untuk membantu Komisi dalam waktu yang singkat secara relatif, khususnya untuk persoalan-persoalan teknis." Saat ini, Komisi mempunyai limabelas staf internasional, termasuk sebelas orang dibayar oleh organisasi lain, dan beberapa konsultan internasional lain dikontrak untuk satu atau dua bulan. Staf internasional yang dipekerjakan oleh CAVR secara langsung termasuk, dua orang penerjemah, satu orang peneliti, dan satu orang penasihat.

Tidak seperti kebanyakan staf dan penasihat internasional yang bekerja di Timor Lorosa'e, banyak dari mereka yang bekerja di CAVR telah lama mendukung perjuangan Timor Lorosa'e untuk merdeka sebagai aktivis sukarelawan dalam gerakan solidaritas internasional. Pengetahuan mereka mengenai sejarah Timor Lorosa'e, rasa simpatik yang dalam bagi rakyat Timor Lorosa'e, dan ketrampilan berbahasa Tetum dan Bahasa Indonesia lebih baik daripada kebanyakan staf internasional lainnya. Dari konteks ini, kami heran bahwa CAVR mengalami persoalan yang sama dengan staf lokal dan internasional, persoalan yang meresap di negara baru ini. Hal ini menunjukkan bagaimana sulitnya untuk membangun sebuah lingkungan kerja yang setara ketika orang-orang dibayar dengan skala gaji, tingkat pengalaman, pengharapan, dan kondisi kerja yang berbeda.

Kebanyakan staf internasional yang bekerja di CAVR saat ini dibayar oleh kontribusi secara sukarela melalui UNDP bagi 200 “pos” pembangunan yang diidentifikasi oleh UNDP bagi administrasi pemerintah dan pengembangan kemampuan pegawai negeri. Mereka tidak mengajukan kebijakan staf dan peraturan kerja CAVR, menimbulkan kesebalan di antara kawan-kawan Timor Lorosa’e, termasuk para komisaris. Beberapa dari Komisaris tidak mengetahui staf internasional baru yang bekerja di CAVR, meskipun baru-baru ini telah dibentuk tim rekrutmen bagi staf internasional, termasuk dua komisaris nasional. Bahkan setelah pembentukan tim, banyak yang berpikir bahwa para penasihat internasional yang telah bekerja di CAVR telah memiliki peran utama dalam memutuskan staf internasional baru, karena para penasihat telah mengetahui mereka yang melamar pekerjaan di CAVR.

Program menejer adalah seorang penasihat internasional di bawah kontrak UNDP. Sebagai hasilnya, banyak staf CAVR tidak memahami fungsi para penasihat internasional; apakah mereka pembuat kebijakan atau penasihat bagi staf dan komisaris Timor Lorosa’e?

La’o Hamutuk mendapatkan informasi bahwa proses evaluasi terhadap para penasihat internasional yang dikontrak oleh UNDP, pantas untuk dipertanyakan Dengan formulir evaluasi yang telah dibaca oleh staf yang dievaluasi, yang menciptakan kesulitan untuk memberikan evaluasi yang independen dan terbuka.

Beberapa staf orang Timor CAVR yang dihubungi untuk artikel ini, merasa bahwa beberapa penasihat internasional membuat keputusan tanpa mendiskusikannya dulu dengan koordinator divisi yang relevan, yang merupakan anggota staf nasional. Sebagai hasilnya, muncul perasaan yang meluas di kalangan staf nasional CAVR bahwa lembaga ini didominasi oleh staf internasional. Daripada bertindak sebagai pembimbing, mereka dipekerjakan di bawah peraturan UNDP, beberapa staf internasional menampilkan fungsi pembuat kebijakan. Pada sisi lain, beberapa staf nasional merasa bahwa para penasihat seharusnya mengerjakan pekerjaan yang sulit, dengan pertimbangan bahwa mereka menerima gaji yang sangat tinggi dari lembaga-lembaga internasional.

Dengan demikian sangat jelas bahwa dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antara staf lokal dan para penasihat, untuk mengidentifikasi bagaimana para penasihat internasional benar-benar membantu dan mempersiapkan para staf lokal agar mampu bertindak sendiri. Proses komunikasi ini penting karena banyak staf lokal masih merasa mendapatkan campur tangan. Meskipun ketrampilan berbahasa dari staf internasional lebih baik dari lembaga-lembaga lain, kadang-kadang staf nasional mengeluh mengenai kesulitan komunikasi yang kurang lancar dengan para penasihat internasional meskipun mereka mengakui bahwa kelancaran berbahasa Inggris para staf internasional sangat membantu berhubungan dengan penyandang dana atau lembaga internasional.

Peran staf internasional semakin dibingungkan dengan situasi sementara di CAVR; baik staf internasional maupun lokal, mereka akan kehilangan pekerjaan ketika CAVR berakhir pada 2004. Meskipun pada pelatihan kerja (on job

training) akan menguntungkan semua staf lokal dan keseluruhan masyarakat Timor Lorosa’e, pelatihan ini tidak bisa menambah banyak efisiensi CAVR selama terbatasnya mandat.

Beberapa orang mengatakan bahwa staf nasional tidak memiliki kemampuan yang sesuai atau tidak cukup pro-aktif untuk mempelajari keahlian yang dimiliki staf internasional, meskipun yang lain merasa bahwa proses pemilihan bagi staf nasional, khususnya eksekutif telah memilih orang-orang yang lebih berpengalaman.

Kesimpulan

Setelah *La’o Hamutuk* memulai wawancaranya dengan orang-orang di CAVR, manajemen CAVR secara jelas mengatakan kepada staf nasional CAVR di bawah tingkatan kepala divisi tidak berbicara dengan para peneliti *La’o Hamutuk*. Meskipun kami mengerti kebutuhan bagi staf CAVR untuk mengfokuskan diri pada pekerjaan utama mereka, perintah ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan. Kami berharap bahwa hal ini bukan merupakan tanda sebuah lembaga yang mempertahankan diri yang dapat membuat persoalan menjadi lebih sulit bagi CAVR untuk melayani pengikut utamanya rakyat Timor Lorosa’e secara efektif, khususnya para korban pelanggaran hak asasi manusia, dengan menggunakan semua informasi dan sumber daya manusia yang tersedia, baik di dalam maupun luar CAVR.

Pada saat CAVR mempublikasikan laporan akhirnya satu tahun dari sekarang, hal ini akan mengambil banyak problem-problem yang sulit, mengucilkan perbedaan dan kadangkala informasi yang subyektif, bekerja dalam bahasa yang beragam, dan mengarahkan antara tekanan politik yang nyata dan potensial. Kami berharap bahwa laporan akan diteliti dan diterima dengan baik, dan laporan tersebut akan memberikan penerang baru tidak hanya apa yang dilakukan terhadap rakyat di Timor Lorosa’e antara 1974 dan 1999, tetapi bagaimana hal ini dilakukan, mengapa, dan oleh siapa. Kami juga menanti rekomendasi-rekomendasi CAVR untuk melanjutkan kerja keadilan, rekonsiliasi, pemulihan dan pencarian kebenaran, juga tindak lanjut kegiatan dan kebijakan. Kami mendukung para penulis laporan CAVR untuk berpikir secara tegas dan luas, dan mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi yang potensial dengan skala yang luas dari masyarakat di Timor Lorosa’e. Dalam jangka panjang, laporan tersebut dapat menjadi hasil yang paling bernilai dan penting dari kerja CAVR.

CAVR telah dan akan melanjutkan kerja pelayanan yang bernilai dalam mengakui pengalaman para korban, melaksanakan keadilan restoratif pada tingkat komunitas, dan tidak menutupi dan mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosa’e sejak 1974. Akan tetapi, terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah hal ini benar-benar diarahkan oleh rakyat Timor Lorosa’e, cocok dengan kebutuhan-kebutuhan bangsa ini dan melayani prioritas penduduk Timor Lorosa’e. Dan berapa banyak biaya bangsa ini kehilangan kesempatan untuk memegang para pelaku utama bertanggungjawab untuk kejahatan mereka? ❖

Pengungsi Timor Lorosa'e di Timor Barat

Pada tahun 1999, sekitar 250.000 orang Timor Lorosa'e mengungsi atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat, dimana kebanyakan di antara mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang tersebar di Kabupaten Belu dan Kupang. Kini sebagian besar pengungsi tersebut telah kembali ke Timor Lorosa'e, namun menurut UNHCR dan Pemerintah Indonesia bahwa terdapat sekitar 28.000 pengungsi yang masih tinggal di kamp-kamp di Timor Barat.

Pada 31 Desember 2002, UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) telah mencabut status pengungsi, artinya secara resmi para pengungsi yang masih berada di Timor Barat tidak lagi dianggap sebagai pengungsi. Dan karena status internasional sebagai pengungsi sudah dicabut, maka perlindungan internasional terhadap mereka sebagai pengungsi juga berakhir. Akan tetapi masyarakat internasional masih mempunyai tanggung jawab terhadap masalah pengungsi dan seharusnya menyediakan solusi yang layak untuk puluhan ribu pengungsi yang sampai saat ini masih tinggal di kamp-kamp. Artikel ini menulis situasi para pengungsi saat ini berdasarkan hasil investigasi *La'o Hamutuk* pada bulan Juli dan Agustus 2003, termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Timor Barat.

Pemulangan Kembali/Repatriasi

Dari tahun 1999 hingga 2003 ini UNHCR dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) telah membantu memulangan para pengungsi ke Timor Lorosa'e, memfasilitasi transportasi dari seluruh wilayah Indonesia. Jika pengungsi kembali ke Timor Lorosa'e dengan kendaraan darat, kapal laut atau pesawat, transportasi IOM dan UNHCR akan selalu siap sedia untuk mengantar pengungsi sampai ke tempat tujuan mereka. Pengungsi yang kembali ke Timor Lorosa'e kebanyakan diorganisir oleh UNHCR,

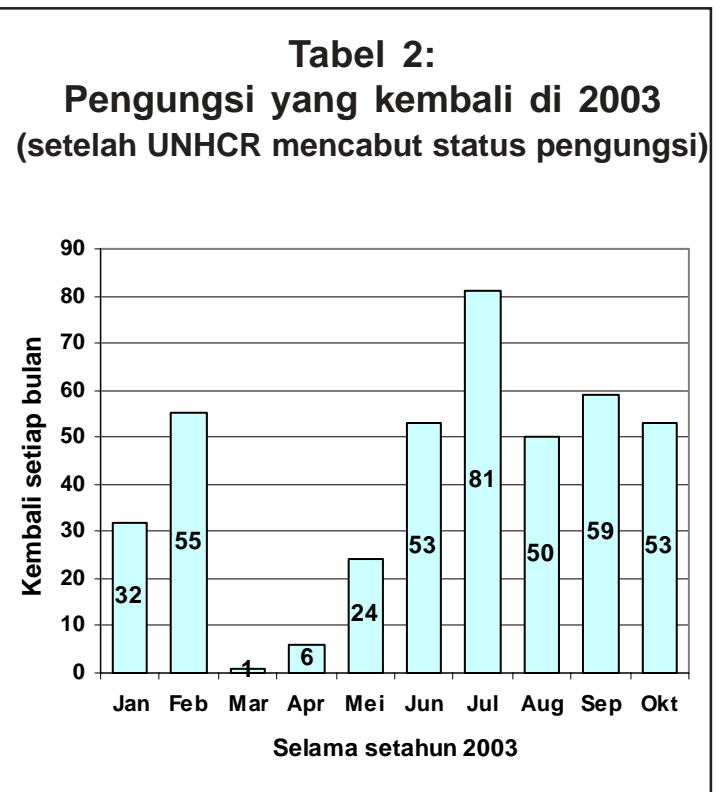
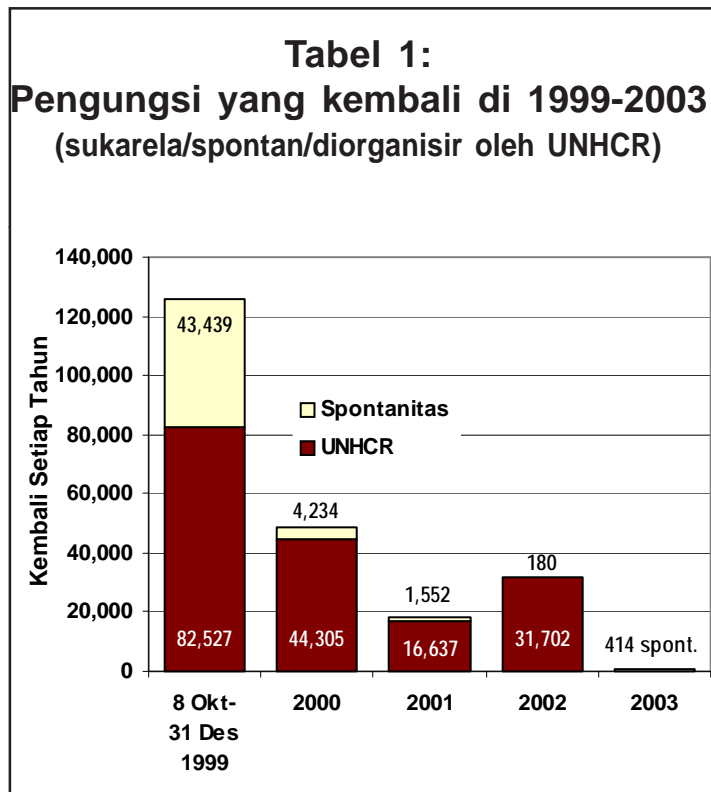
namun juga ada yang kembali atas inisiatif sendiri, tanpa bantuan UNHCR. (Lihat Tabel 1)

Pada tahun 2003, para pengungsi yang kembali semakin menurun. Pada empat bulan pertama, ketidakjelasan prosedur pemulangan dan tidak adanya alokasi dana dari pemerintah Republik Indonesia, untuk biaya administrasi dan operasional Satkorlak NTT. Hal ini telah menghambat para pengungsi untuk kembali ke Timor Lorosa'e. Pada bulan Mei, IOM dan Satkorlak NTT sepakat untuk tetap memfasilitasi para pengungsi yang ingin kembali ke Timor Lorosa'e. IOM menyediakan transportasi, administrasi, dan juga biaya operasional untuk satuan koordinasi pengungsi tingkat kabupaten NTT (Satlak PBP).

Untuk memfasilitasi para pengungsi yang kembali, IOM bekerja sama dengan Satlak-PBP dan JRS (*Jesuit Refugee Service*) mengunjungi kamp-kamp pengungsi untuk memberikan informasi dan melakukan pendataan bagi pengungsi yang ingin pulang ke Timor Lorosa'e (baik di kamp maupun pengungsi sendiri yang mendatangi JRS untuk mendaftar). Biaya administrasi, seperti formulir dan photo bagi pengungsi didanai oleh IOM.

Satlak juga menyediakan transportasi dan menginformasikan kepada IOM di Timor Lorosa'e mengenai identitas para pengungsi yang ingin kembali, termasuk mengenai jumlah keluarga yang pulang dan tanggal kepulangan mereka serta tempat asal mereka. Pada hari kedatangan pengungsi, IOM telah siap di perbatasan dengan transportasi untuk menjemput para pengungsi. Selain itu, IOM juga menyediakan biaya transportasi bagi para pengungsi dari kamp sampai ke perbatasan.

Di perbatasan, IOM, UNHCR dan CAVR menerima pengungsi dan melakukan wawancara terhadap para



pengungsi yang kembali untuk memastikan perlindungan terhadap mereka, jika suatu saat mendapatkan persoalan selama masa penyatuan di komunitas mereka. Bagi pengungsi yang diketahui mempunyai masalah, untuk sementara ditempatkan di tempat penampungan yang aman. Kemudian IOM, UNHCR, CAVR dan Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET akan melakukan dialog dengan masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan mengenai kedatangan para pengungsi tersebut.

Bagi pengungsi yang tidak mempunyai masalah, mereka langsung diantar ke komunitas asal mereka di Timor Lorosa'e. Menurut sumber dari UNHCR, mereka melakukan pemantauan terhadap para pengungsi yang kembali ke tempat tinggal asal pengungsi. Meskipun *La'o Hamutuk* memperoleh informasi dari beberapa distrik, UNHCR hanya sedikit melakukan pemantauan lebih jauh terhadap para pengungsi setelah mereka dibawa ke daerah asal mereka. Jika terdapat intimidasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap mereka oleh masyarakat lokal, dimana terdapat kemungkinan munculnya rasa tidak aman terhadap para bekas pengungsi, mendorong mereka untuk kembali ke Timor Barat. Sumber yang sama dari UNHCR juga mengakui bahwa beberapa pengungsi yang telah pulang, kembali ke Timor Barat tanpa alasan yang jelas. Kejadian-kejadian seperti ini bukanlah dorongan untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan para pengungsi. (Lihat Tabel 2)

UNHCR dan IOM memiliki dana yang dialokasikan khusus bagi pengungsi. *La'o Hamutuk* mendapatkan informasi mengenai anggaran UNHCR bagi program pemulangan dan bantuan bagi para pengungsi, namun sayangnya IOM menolak untuk secara terbuka menginformasikan anggaran yang digunakannya untuk para pengungsi.

Anggaran UNHCR: Pemulangan dan Penyatuan Pengungsi yang Kembali dan yang Dipaksa Pindah

Tahun	Anggaran
2000	\$15.676.966
2001	\$6.203.260
2002	\$1.321.153
2003	\$634.640
TOTAL	\$23.836.027

Setelah pembunuhan tiga staf internasional UNHCR di Atambua pada tahun 2000, maka UNHCR di Timor Lorosa'e secara total menarik semua staf mereka dari Timor Barat. Akibatnya, UNHCR di Timor Lorosae hanya memberikan bantuan kepada pengungsi yang kembali ke Timor Lorosae saja, termasuk memfasilitasi transportasi seperti yang disebut di atas dan bahan-bahan pokok; seperti makanan, alat-alat dapur dan terpal. Bantuan UNHCR ini juga termasuk program rumah sementara untuk pembangunan kembali 35.000 rumah bagi pengungsi yang pulang dan telah berakhir pada tahun 2001 (Baca *Buletin LH Vol. 3, No 1 dan Vol. 1, No 2*).

Istilah "Orang-orang yang dipindahkan paksa" merujuk kepada masyarakat Timor Lorosa'e yang tidak pernah meninggalkan Timor Lorosa'e tetapi dipaksa untuk meninggalkan desa-desa mereka karena aksi pertempuran pada akhir 1999.

Kondisi Pengungsi di Timor Barat

Pada tahun 1999, terdapat sekitar 175 kamp di Timor Barat dan sekarang ini masih terdapat sekitar 145 kamp. Di kabupaten Kupang hanya terdapat 3 kamp saja, tetapi masing-masing padat pengungsi, misalnya di Tuapukan terdapat 7.000 pengungsi.

Pasca pembunuhan tiga staf internasional UNHCR dan sejumlah orang Timor Lorosa'e dan Timor Barat di Atambua tahun 2000, semua staf internasional dari hampir semua lembaga internasional di Timor Barat dievakuasi dan bantuan untuk pengungsi berkurang. Akan tetapi masih terdapat beberapa organisasi internasional yang tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, seperti CRS, CWS, JRS, UNICEF, WHO, Oxfam GB, dan CARE dengan mempekerjakan staf LSM Indonesia. Namun, juga masih terdapat kendala keamanan yang merupakan masalah bagi PBB dan LSM-LSM internasional tersebut untuk melakukan pemantauan dan memberikan bantuan bagi pengungsi. Di tahun 2000, Timor Barat dikategorikan sebagai salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia dan secara umum staf internasional dilarang bepergian ke wilayah Timor Barat. Meskipun situasi keamanan telah membaik setelah pembunuhan tiga staf UNHCR tersebut, Indonesia belum menjawab tuntutan keadilan dengan semestinya di dalam kasus ini dan PBB belum mengubah klasifikasi tingkat bahaya wilayah ini, yang memberikan dorongan organisasi-organisasi lain tidak bekerja di Timor Barat.

Pada awal 2000, jauh sebelum pencabutan status pengungsi oleh UNHCR diterapkan, Pemerintah Indonesia menghentikan bantuan kepada pengungsi sebagai suatu strategi pemaksaan bagi para pengungsi untuk keluar dari kamp. Menurut hasil lokakarya di Yogyakarta tentang pengungsi yang disponsori oleh Bakornas PBP dan UN-OCHA, Pemerintah Indonesia akan menghentikan dana sektoral untuk bantuan kepada pengungsi di tahun 2004. Sisa bantuan pemerintah tidak dikhususkan bagi pengungsi saja, tetapi bagian dari anggaran *program pengentasan kemiskinan* Propinsi NTT dan pemerintah lokal, yang diberikan bagi penduduk NTT secara umum. Hal ini berarti pemerintah mengasumsikan pengungsi bagian dari orang-orang miskin di NTT, bukan orang-orang yang dipaksa pindah menyelamatkan diri dari kampung halamannya karena konflik atau kebijakan pemerintah.

Saat ini para pengungsi di kamp-kamp di Timor Barat berkurang jumlahnya secara lamban. Para pengungsi kini secara pelan-pelan mulai membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Kamp-kamp pengungsi baru juga telah dibangun untuk para anggota TNI yang masih aktif dan juga yang telah pensiun dari masa baktinya di Timor Lorosa'e. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak lagi tinggal berbaur dengan pengungsi lainnya, sehingga pengungsi sipil diharapkan bisa bebas dari intimidasi di kamp pengungsian. Faktor-faktor ini telah membantu untuk memperbaiki situasi pengungsi. Tetapi bukan berarti persoalan-persoalan mereka telah teratasi atau memudahkan hidup mereka. Sebenarnya semua bantuan dari masyarakat internasional dan Pemerintah Indonesia telah lama dihentikan. Selain laporan dari LSM-LSM dengan sumber daya yang terbatas, tidak ada banyak data terbaru yang dapat dipercaya mengenai situasi kemanusiaan dari para pengungsi yang tersisa di kamp-kamp.

Sebuah hasil survei yang dikoordinasikan oleh Oxfam GB dan CIS Timor (Pusat Sukarelawan untuk Pelayanan Orang-orang yang Dipindahkan Paksa di Timor) pada bulan November 2002, menyatakan bahwa situasi pangan dan gizi mencemaskan di hampir semua kamp (para pengungsi makan kurang dari tiga kali sehari), sanitasi dan air yang tidak memadai dan krisis kesehatan terutama anak-anak, karena kurangnya pelayanan kesehatan.

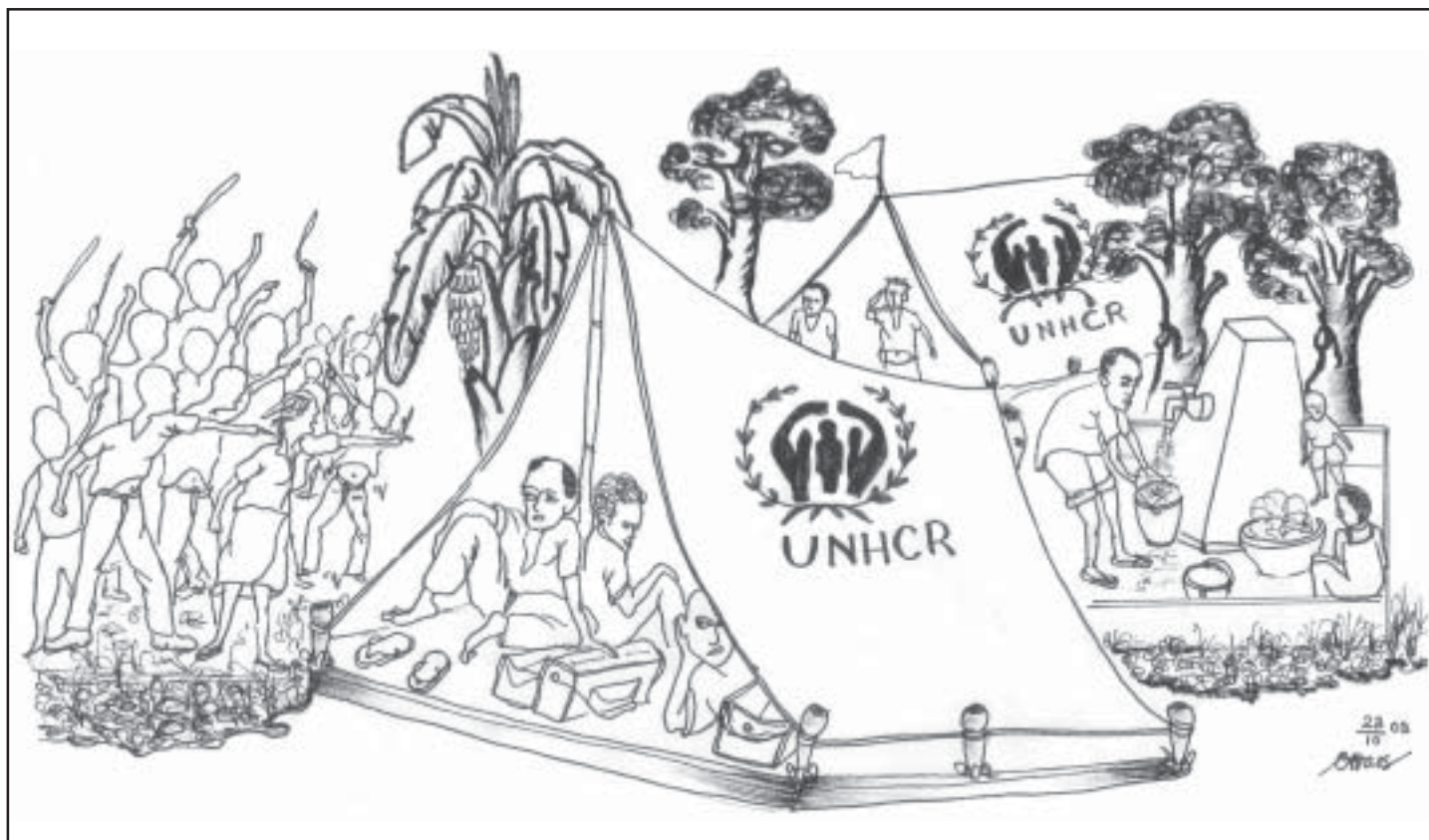
Propinsi NTT mempunyai sumber daya yang sangat terbatas untuk pelayanan umum dan banyak anggota dari masyarakat lokal yang menambah ketegangan dengan diberikannya anggaran lokal bagi para pengungsi. Saat ini terdapat kebijakan yang mendiskriminasi para pengungsi untuk mendapatkan akses pelayanan umum, seperti sekolah, pelayanan kesehatan, dan program jaringan pengaman sosial dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan beras murah. Hal ini juga terjadi pada para bekas pengungsi yang telah bermukim di komunitas lokal.

Di beberapa kamp dan pemukiman, perselisihan tanah merupakan persoalan umum antara para pengungsi dan masyarakat lokal. Pada saat para pengungsi dideportasi ke Timor Barat pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada masyarakat lokal bahwa para pengungsi memakai lahan mereka untuk sementara. Di beberapa tempat, masyarakat lokal telah menuntut para pengungsi untuk kembali ke Timor Lorosa'e. Ketegangan ini juga diperburuk dengan adanya kompetisi di antara para pengungsi dan masyarakat lokal untuk mendapatkan pelayanan umum dan sumber daya alam yang terbatas (misalnya air bersih). Ketegangan ini akan berlanjut jika perselisihan pertanahan tidak diselesaikan.

Program Pemukiman/Relokasi

Pemerintah Indonesia, dengan bantuan dari Pemerintah Jepang, Masyarakat Eropa, dan UNHCR melakukan program pemukiman untuk pengungsi yang tidak merencanakan kembali ke Timor Lorosa'e. Program ini dibawah pengelolaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah). Ada juga program-program pemukiman yang dikelola oleh Dinas Sosial dan TNI. Dan tidak seperti program transmigrasi, semua pemukiman untuk relokasi berlokasi di NTT. Sejak 2000, sebagian besar relokasi dilakukan di Timor Barat. Akan tetapi untuk tahun 2002-2003, program yang didanai UNHCR hanya membangun rumah di pulau-pulau lain di luar Timor Barat, seperti Pulau Sumba, Flores, dan Alor. Menurut survei Oxfam GB, hanya 13 persen dari pengungsi yang mau melakukan perpindahan tempat ke luar Timor Barat. Kondisi ini bisa dimengerti karena masih terdapat kemungkinan bahwa mereka akan kembali ke Timor Lorosa'e di masa akan datang dan juga karena jarak yang dekat untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan keluarga di Timor Lorosa'e. Pemukiman baru yang didirikan di Timor Barat sangat cepat terisi, tapi masih terdapat keengganan dari para pengungsi untuk bersedia pindah ke pemukiman lain di pulau lain. Program pemukiman UNHCR/UNDP di luar Timor Barat, khususnya di Sumba Barat mengalami kesulitan untuk meminta kesediaan para pengungsi. Dari 550 keluarga yang direncanakan, hanya sekitar 15-20 keluarga yang ditempatkan selama ini.

Sebagai tambahan, Pemerintah Indonesia sangat lamban membangun wilayah-wilayah pemukiman baru. Dalam satu tahun lalu, hanya sekitar 200 buah rumah yang baru dibangun karena kesulitan menemukan tanah pemukiman setempat di

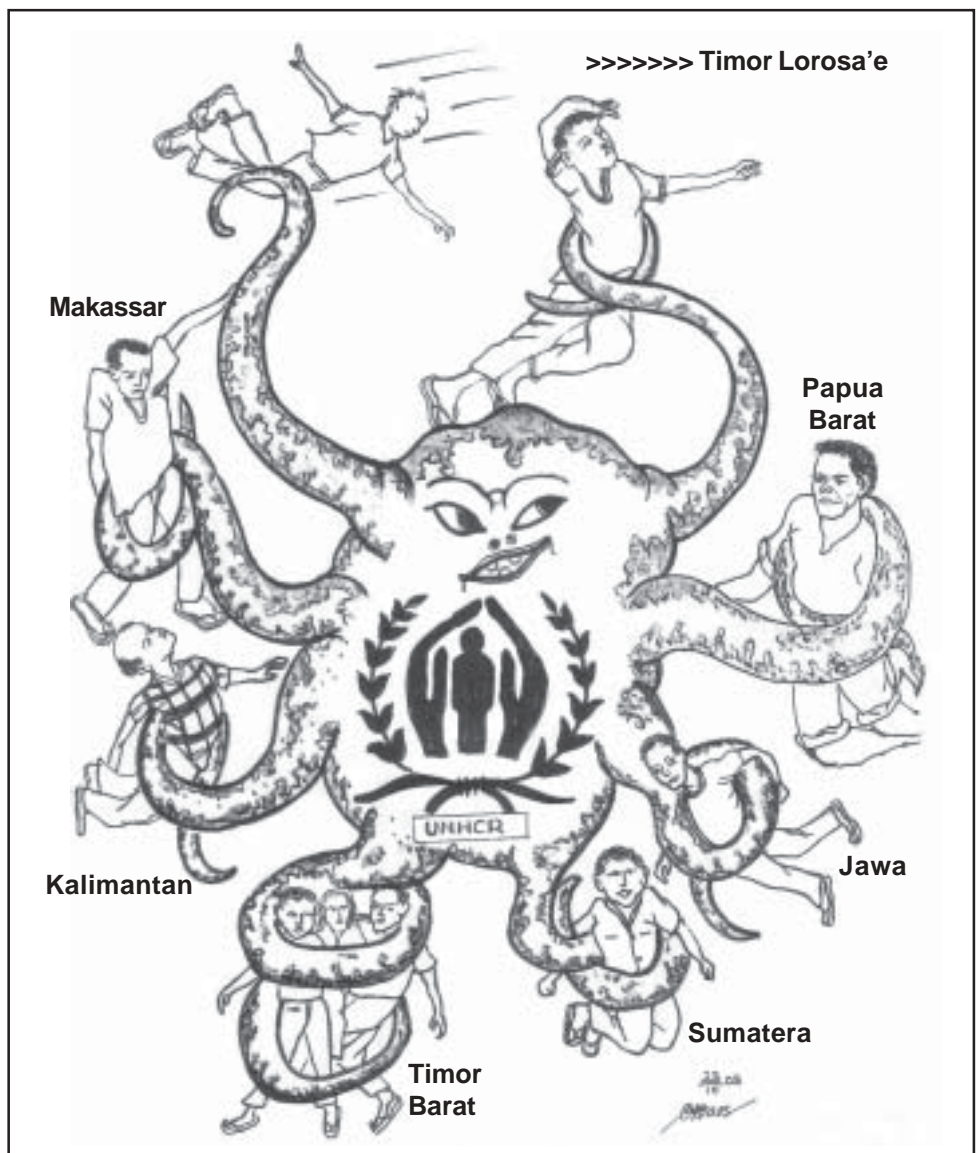


dalam Timor Barat. Kondisi rumah di pemukiman baru sangat memprihatinkan, berukuran kecil dan kualitas perumahan yang tidak baik, cepat rusak. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan penggunaan bantuan dari pemerintah Jepang dan UNHCR. Para pejabat dari empat kabupaten di Timor Barat juga telah menyatakan keengganan mereka untuk menerima para pengungsi di dalam wilayah mereka, dengan alasan para pengungsi telah tinggal di daerah mereka selama empat tahun dan telah menimbulkan banyak masalah terhadap penduduk setempat. Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 40 persen rumah di pemukiman baru untuk para mantan pengungsi dan memberikan sisa rumah kepada masyarakat lokal, dan sebagian lagi kepada orang-orang Indonesia yang bertransmigrasi dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Terdapat beberapa masalah antara para pengungsi dan masyarakat lokal, tetapi pemerintah tidak mengambil langkah-langkah penting untuk mencegahnya. Adanya situasi seperti ini, kadang-kadang masyarakat lokal menempati wilayah pemukiman yang secara khusus dibangun untuk para bekas pengungsi. Terdapat beberapa kasus dimana masyarakat lokal menempati seluruh perumahan di wilayah relokasi pengungsi. Namun beberapa penduduk lokal mengizinkan para pengungsi untuk menggunakan tanah mereka (contohnya, masyarakat lokal di desa Kereana, dekat Betun, mengizinkan tanah mereka ditempati oleh para pengungsi dari kamp Sukabitetek). Hal ini tergantung kepada cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah setempat untuk berbicara mengenai situasi yang ada. Jika Pemerintah Indonesia masih tetap lamban untuk menyelesaikan persoalan tersebut, akan memakan waktu paling tidak 10 tahun untuk memindahkan semua warga negara Timor Lorosa'e yang ingin menjadi warga negara Indonesia.

Status Pengungsi

Sejak penerapan klausul penghentian status pengungsi oleh UNHCR pada tanggal 31 Desember 2002, maka orang Timor Lorosa'e yang masih berada di Timor barat dihadapkan pada empat pilihan, yaitu:

1. Kembali ke Timor Lorosa'e
2. Menetap di Timor Barat, dengan mengikuti program pemukiman (semacam transmigrasi) di Timor Barat
3. Menetap di luar Timor Barat, dengan mengikuti program pemukiman di luar Timor Barat
4. Menetap di lokasi sekarang, meskipun tidak dapat didukung oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional/PBB.



Menurut hasil survei LSM di Timor Barat yang dilakukan dari Nopember 2002–Januari 2003, didapatkan sekitar setengah dari jumlah total pengungsi ingin kembali ke Timor Lorosa'e. Akan tetapi masih ada keraguan terhadap masalah keamanan di Timor Lorosa'e, masalah pengembalian asset mereka yang diambil alih oleh pihak lain, masalah lapangan kerja dan juga masalah lainnya. Sementara sekitar 50 persen dari pengungsi yang tersisa masih mempertimbangkan untuk kembali ke Timor Lorosa'e dalam waktu dua tahun mendatang. Alasan-alasan lain yang menahan mereka adalah ketergantungan mereka kepada gaji Pemerintah Indonesia (PNS, TNI, polisi, para pensiunan, termasuk para janda) dan rasa takut akan hukuman karena keterlibatan mereka dalam tindak kejahatan di tahun 1999.

Pemerintah Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengesahkan juga sebuah ketetapan (TAP MPR No. VI/MPR/1999) dan Surat Keputusan Presiden (No.25/2003) tentang status kewarganegaraan bagi masyarakat Timor Lorosa'e yang masih berada di Indonesia. Keppres yang direncanakan pada bulan Mei 2003, memberikan tawaran kepada Timor Lorosa'e kepada bekas Propinsi Timor Lorosa'e:

1. “tetap” sebagai warga negara Indonesia; atau
2. menjadi warga negara Timor Lorosa'e yang memiliki ijin tinggal di Indonesia sebagai orang asing selama satu tahun.

Keputusan Presiden tersebut mewajibkan penduduk bekas Propinsi Timor Timur (termasuk mereka yang bukan asli Timor Lorosa'e) untuk berpartisipasi dalam pendaftaran yang telah diselesaikan pada 30 September 2003. Keputusan Presiden ini tidak menjelaskan lebih jauh konsekuensi dari kedua pilihan tersebut. Juga tidak terdapat kejelasan mengenai konsekuensi seseorang bila ia tidak mendaftar hingga terlampauinya batas waktu pendaftaran.

Bagi masyarakat Timor Lorosae yang ingin menjadi warga negara Timor Lorosa'e, namun tetap tinggal di Indonesia akan diberikan surat keterangan tempat tinggal sementara orang asing yang berlaku selama satu tahun. Diharapkan suatu saat, mereka akan diharuskan mempunyai dokumen-dokumen resmi, seperti paspor, untuk membuktikan kewarganegaraan Timor Lorosa'e, dan memperoleh sebuah visa ijin tinggal melalui prosedur yang diberlakukan bagi warga negara asing. Akan tetapi, Pemerintah Timor Lorosa'e tidak menyebarkan proses yang jelas mengenai teknis pengajuan kewarganegaraan Timor Lorosa'e bagi para pengungsi tanpa harus kembali dulu ke Timor Lorosa'e. Perlu diragukan apakah para pengungsi yang memilih kewarganegaraan Timor Lorosa'e dapat memenuhi syarat administrasi ini tanpa bantuan dari Pemerintah Timor Lorosa'e. Mereka adalah subyek dari hukum Timor Lorosa'e juga, sehingga Pemerintah Timor Lorosa'e berkewajiban untuk membantu mereka.

Hampir semua pengungsi berhak atas kewarganegaraan Timor Lorosa'e. Tetapi, Undang-Undang Kewarganegaraan Timor Lorosa'e juga mensyaratkan beberapa dokumen seperti akte kelahiran untuk membuktikan tempat asal seseorang, dan banyak dari para pengungsi yang tidak pernah memiliki atau kehilangan dokumen semacam itu, khususnya selama kekacauan di tahun 1999. Mengingat singkatnya waktu bagi para pengungsi untuk mendaftarkan diri dan kurangnya alokasi dana dari Pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan proses pendaftaran tersebut, disangsikan bahwa para pengungsi dapat menentukan pilihan mereka secara sadar tentang status masa depan mereka.

Banyak dari para pengungsi masih tidak sadar akan pentingnya kewarganegaraan dan implikasinya, yang seringkali dipandang sebagai satu perangkat nasionalisme semata-mata, tanpa adanya konsekuensi hukum. Hal ini diperburuk dengan kurangnya informasi yang diberikan kepada para pengungsi mengenai proses perolehan kewarganegaraan yang berlaku sekarang dan implikasinya menurut hukum Indonesia dan Timor Lorosa'e. Tanpa kesadaran ini, para pengungsi tidak dapat memilih kewarganegaraan secara benar, tidak terdaftar atau kehilangan batas waktu. Persoalan ini memungkinkan mereka menjadi penduduk tanpa negara dengan sedikit pengakuan terhadap hak-hak hukum mereka di Indonesia.

Kesimpulan

UNHCR mencabut status pengungsi karena membaiknya stabilitas di Timor Lorosa'e. Sejak Timor Lorosa'e membentuk pemerintahan yang dapat melindungi warganegaranya dan menyediakan keadaan yang stabil dan aman, alasan mengapa pengungsi meninggalkan tanah kelahirannya tidak dapat diterima. Sehingga UNHCR, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Lorosa'e mengharapkan pengungsi Timor Lorosa'e yang masih berada di Timor Barat untuk segera memutuskan: kembali ke tanah kelahiran mereka atau menetap di Indonesia. Namun bukan berarti UNHCR cuci tangan dengan mudah atas persoalan tersebut. UNHCR harus tetap membantu para pengungsi untuk mendapatkan penyelesaian akhir.

Bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi selama banyak pengungsi yang masih ingin memutuskan kembali. Agar dapat membantu para pengungsi melakukan keputusan secara sadar dan sukarela, seharusnya sosialisasi yang independen dan seimbang terhadap pilihan yang ditawarkan bagi mereka.

Hanya Pemerintah Timor Lorosa'e yang dapat menentukan siapa warga negara Timor Lorosa'e, sehingga Pemerintah Indonesia harus bekerja sama lebih dekat dengan Pemerintah Timor Lorosa'e dalam isu kewarganegaraan. Sangat penting untuk memberikan informasi yang seimbang dan membantu para pengungsi untuk memutuskan status kewarganegaraan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat ketentuan-ketentuan atas ketiadaan dokumen-dokumen hukum. Pemerintah Indonesia harus menerapkan suatu mekanisme untuk memungkinkan para pengungsi mendaftarkan diri setelah batas waktu 30 September, mengingat masih terdapat banyak pengungsi yang belum memahami pentingnya status kewarganegaraan.

Pemerintah Timor Lorosa'e harus melakukan pemantauan terhadap pengungsi yang telah kembali ke Timor Lorosa'e untuk memastikan keamanan dan membantu mereka menyatu kembali dengan masyarakat, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga mereka melihat bahwa Pemerintah Timor Lorosa'e menaruh perhatian.

Pemerintah Indonesia harus menggunakan dana yang terbatas dari para penyandang dana bagi kepentingan pengungsi dengan lebih baik. Semua kebijakan yang diskriminatif terhadap para pengungsi yang telah memilih tinggal di kamp-kamp pengungsi, wilayah pemukiman-pemukiman setempat atau di tempat-tempat lain di Indonesia harus diakhiri sesegera mungkin. Pemerintah lokal Indonesia harus memperlakukan para pengungsi yang baru saja menetap dan masyarakat lokal sebagai masyarakat yang berhubungan satu sama lain, menyetarakan perlakuan antara para pengungsi dan warga setempat sebagai satu masyarakat, dan menyertakan para pengungsi di dalam program jaringan pengaman sosial, program pengentasan kemiskinan, dan program-program lain jika para pengungsi Timor Lorosa'e memutuskan menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya. ❖

Berita singkat...

Expo Popular

Pada tanggal 25-30 Agustus 2003, HASATIL (*Hametin Sustenavel Agrikultura Timor Lorosa'e*) sebuah jaringan kerja organisasi lokal dan kelompok kerja petani yang bekerja untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e, bersama-sama dengan LSM lokal dan internasional menyelenggarakan Expo popular II di Taman Borja da Costa, Farol, Dili. Expo-Popular mencoba meningkatkan kesadaran masyarakat Timor Lorosa'e tentang pertanian produksi dalam negeri untuk mengetahui potensi dan menjalin kerja sama antara pemerintah, pengusaha, petani dan masyarakat. Expo juga menyikapi model pertanian alternatif yang berorientasi pada kepentingan petani lokal kecil.

Sebagai tambahan di dalam pameran produk pertanian lokal Timor Lorosa'e, Expo juga mengadakan diskusi yang melibatkan petani, pengusaha dan pemerintah, berbasis pada prinsip bahwa keseluruhan proses pembangunan, khususnya pertanian, adalah tanggung jawab seluruh warga Timor Lorosa'e. Keberhasilan dari Expo adalah kesepakatan antara HASATIL dan CCTL (*Camara Comercio de Timor Lorosa'e*). Kesepakatan tersebut memuat lima poin, sebagai berikut:

1. Pengusaha Nasional harus memprioritaskan produk pertanian lokal
2. Pengusaha Nasional harus menyediakan informasi tentang peluang pasar kepada petani dan LSM yang mendukung pertanian rakyat
3. LSM membantu peningkatan kemampuan teknis para petani untuk meningkatkan kualitas produk pertanian lokal
4. Para petani harus memperbaiki kuantitas maupun kualitas pertanian lokal
5. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian dengan meningkatkan kemampuan petani Timor Lorosa'e, pelestarian lingkungan dan perlindungan produk-produk lokal dan petani dari kompetisi pasar dan produk-produk impor.

Lokakarya tentang Jender dan Pengentasan Kemiskinan

Lokakarya Bank Dunia Regional II tentang Gender dan Strategi Pengentasan Kemiskinan diselenggarakan di Siem Reap, Cambodia dari 17-18 September 2003. Para peserta lokakarya ini datang dari enam negara berbeda: Laos, Mongolia, Vietnam, Indonesia, Timor Lorosa'e dan Kamboja. Lokakarya diadakan untuk meninjau kembali dan bertukar pengalaman persiapan strategi-strategi pengentasan kemiskinan yang berperspektif jender; mendiskusikan pentingnya indikator-indikator yang berperspektif jender dalam penerapan dan pemantauan strategi-strategi ini; serta meningkatkan pemahaman akan anggaran dan advokasi bagi kebijakan prioritas yang berkaitan dengan gender.

Utusan Timor Lorosa'e ke Siem Reap terdiri dari Adelina dos Reis Caldeira Noronha (Asisten pada Direktorat Pendidikan Anak-anak Usia Pra-Sekolah pada Kementerian Pendidikan); Maria Jose Sanches (Wakil pada Kantor Peningkatan Gender dan Kesamaan); Ivónia da Costa Gonçalves (Sekretaris Wakil Menteri Pertanian pada

Kementerian Pertanian); Odete da Silva Viegas Araújo (Kementerian Kesehatan); Judit Dias Ximenes (Anggota Parlemen); Maria Manuela Leong Pereira (Fokupers); Keryn Clark (Oxfam Australia) dan Thomas Freitas (*La'ò Hamutuk*).

Utusan dari Timor-Lorosa'e menyajikan makalah mereka mengenai pelaksanaan pemantauan strategi pengentasan kemiskinan di Timor-Lorosa'e. Tomas Freitas dari *La'ò Hamutuk* menyampaikan pengalaman pemantauan tiga strategi pengentasan kemiskinan di Timor Lorosa'e: TFET (dana hibah), Program Dukungan Transisi (TSP), dan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam pemantauan Dana Hibah (TFET), Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia mempergunakan pemantauan berdasarkan proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan dan pendidikan. Terdapat keterlibatan Pemerintah atau masyarakat sipil yang rendah, dengan rendahnya indikator jender atau rekomendasi mengenai program dan kebijakan jender.

Dukungan anggaran kepada Pemerintah RDTL, seperti digambarkan di dalam Rencana Pembangunan Nasional, dikelola oleh Bank Dunia melalui TSP (*Baca Buletin LH Vol. 4, No.2*). Sebuah sistem pemantauan Rencana Pembangunan Nasional dikembangkan saat ini dialog Pemerintah dan masyarakat sipil, dan masyarakat internasional telah diundang sebagai pengamat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil juga telah terlibat dalam pemantauan program donor, lembaga keuangan internasional, PBB dan pemerintah. Pada awal tahun ini, LSM bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan dan Keuangan juga melakukan pemantauan independen terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Bank Dunia.

Pertukaran ke Kuba

Pada 1 Oktober, 9 orang pendidik rakyat Timor Lorosa'e dari berbagai LSM yang berbeda berperan serta dalam tiga minggu program pertukaran (*intercambio*) mengenai pendidikan popular di bidang pendidikan, kesehatan dan hal-hal kemasyarakatan lainnya. Di Kuba, mereka diterima oleh *The Martin Luther King Center* (Pusat Martin Luther King), suatu LSM yang memiliki pengalaman luas di bidang pendidikan popular dan pengorganisasian masyarakat. Program mereka tersebut, mencakup seminar dan diskusi mengenai sejarah Kuba dan pengalaman dengan pendidikan popular, serta kunjungan ke sejumlah koperasi rakyat dan proyek-proyek komunitas di mana pendidikan popular digunakan untuk mengembangkan pembangunan alternatif di bidang kesehatan, pertanian dan ekonomi. Kelompok tersebut, termasuk utusan *La'ò Hamutuk*, Sa'he Institutu ba Libertasaun, Perkumpulan Hak, Fokupers, Haburas, Asosiasaun Mane Kontra Violencia, Naroman Bucoli dan Feccu dari Viqueque.

Sekarang mereka telah kembali ke Timor Lorosa'e, kelompok tersebut akan menyelenggarakan dua lokakarya guna berbagi pengalaman yang diperoleh selama kunjungan dengan LSM dan aktivis lokal lain. Pertukaran Timor Lorosa'e-Kuba diorganisir oleh *La'ò Hamutuk* dan Dai Popular. ❖

Lokakarya Bank Pembangunan Asia tentang Pemerintahan yang baik

Lokakarya Regional Kedua Bank Pembangunan Asia (ADB) tentang Pemerintahan yang Baik diadakan di Korolevu Fiji, Kepulauan Pasifik pada tanggal 29-31 Agustus. Peserta lokakarya tersebut terdiri dari negara-negara Kepulauan Pasifik, antara lain: Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Cook, Selandia Baru, Australia, Tonga, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Negara Bagian Mikronesia, Kiribati, dan Timor Lorosa'e. Beberapa penyandang dana/Donor juga hadir, antara lain *Ausaid*, *New Zealand Aid*, *JICA*, *Austral Foundation*, *British High Commission*, *UNDP*, serta *ADB (Bank Pembangunan Asia)*. Dari kalangan LSM dan akademik, hadir pula *Forum Sekretariat*, *Foundation for the Peoples of the South Pacific International (FSPI)*, *Pacific Financial Technical Assistance Centre (PFTAC)*, dan *University of South Pacific (USP)*. Delegasi dari Timor Lorosa'e terdiri dari Agostinho Castro dari Kantor Anggaran Kementerian Perencanaan dan Keuangan; Augusto Soares Barreto, Direktur Unit Koordinasi Pemberdayaan Kemampuan; serta perwakilan dari masyarakat sipil, Tomas Freitas dari *La'o Hamutuk*.

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Asia dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisa program *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik) di kawasan Pasifik Selatan. Lokakarya semacam ini baru pertama kalinya diselenggarakan di kawasan Kepulauan Pasifik. Sebelumnya, lokakarya yang sama telah diadakan tahun lalu di Manila, Filipina, dengan peserta dari negara-negara di Asia Tenggara. Untuk lokakarya di Fiji, delegasi dari Timor-Lorosa'e hanya bertindak sebagai pemantau, karena Pemerintah Timor Lorosa'e belum memutuskan untuk bergabung sebagai anggota Forum Pasifik Selatan.

Pada hari pertama, lokakarya dibuka oleh Robert Y. Siy, Direktur, Divisi Operasional wilayah Pasifik, Bank Pembangunan Asia.

Dr. Qalo: "Pemerintahan di Pasifik"

Makalah pertama dipresentasikan oleh Dr Ropate Qalo, Kepala Sekolah Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Universitas Pasifik Selatan, bertemakan "*A (Uniquely) Pacific Governance Model?*" Makalah ini membahas beberapa hal yang sangat penting bagi masyarakat Fiji, termasuk Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan.

Makalah ini mengenai Pertanggungjawaban, Partisipasi, Keterbukaan dan Perkiraan. Dr Qalo mengatakan bahwa dalam perencanaan agenda jangka menengah, Kegiatan *Bank Pembangunan Asia 2000-2004* mengangkat isu-isu pemerintahan ke tingkat yang paling tinggi dalam jajaran agenda pembangunan Asia Pasifik. Hal demikian dikritisi oleh Pemerintah China, berkaitan dengan pendirian Bank Pembangunan Asia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah China mengatakan bahwa istilah tersebut "terlalu politis" dan Pemerintah China cenderung memilih "Manajemen Pembangunan" dari pada istilah "*Good Governance*" yang disebarluaskan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bank Dunia mendefinisikan pemerintahan sebagai jalan untuk menguji manajemen sebuah negara dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi—sebuah cara yang sopan untuk menaikkan isu yang memalukan, seperti korupsi, ketidakmampuan dan kekuatan yang tidak

berimbang. Ide mengenai *Good Governance* berasal dari lembaga dan teori ekonomi neo-klasik, perusahaan-perusahaan hukum, pengetahuan politik dan sosiologi ekonomi

Makalah ini juga menganalisa pasar ekonomi, dan struktur dan fungsi dari pembangunan. Analisa mengenai pasar ekonomi menyatakan bahwa saat ini, "Negara berarti kemandirian untuk menyediakan standar hidup yang layak bagi semua individu-individu. Hal ini terus berlanjut dan berbaur dengan pandangan "makro", dan semuanya itu berada dalam kewenangan yang terkesan mengacu pada pembangunan infrastruktur yang elit. Kebanyakan rumah tangga di Fiji pada tingkat keuangan mikro tidak bisa menghidupi sebuah kehidupan dari nilai-nilai yang ada pada saat ini karena retorika dari kemerdekaan yang mendominasi hampir segala sesuatu pada tingkat makro. Di Fiji telah tercatat lebih dari 50-60% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan telah terjadi karena rendahnya pendapatan rakyat kelas lebih bawah, yang tidak mampu membayar pajak kepada negara, dan juga karena kondisi ekonomi makro yang dipaksakan kepada mereka oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Setelah Dr Qalo, lokakarya dilanjutkan dengan presentasi makalah oleh Rex Horoi, Direktur Eksekutif untuk *Foundation for the Peoples of the South Pacific International (FPSPI)*, yang berjudul: Perencanaan Pemerintah; Sebuah Laporan Perkembangan mengenai Program Bantuan Teknis Regional (*RETA*), di mana dia menjelaskan perspektif masyarakat di Wilayah Pasifik. Ide dari RETA ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisa unsur-unsur pemerintah yang berasal dari perspektif masyarakat basis. FSPI merupakan sebuah kelompok konsultan yang dipilih oleh Forum Sekretariat untuk memantau Bank Pembangunan Asia dalam kegiatan perencanaan pemerintah di Fiji, Kiribati, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Perencanaan tersebut juga merupakan komponen pokok dari proyek FSPI "*Voices and Choices*" (Suara dan Pilihan), tentang pemerintahan yang baik dan demokrasi di Wilayah Pasifik.

Komunitas dari perencanaan pemerintah melakukan uji coba di Fiji untuk menganalisa prioritas masalah yang mereka hadapi dan kemudian menghubungkannya dengan isu-isu pemerintah, dari perspektif sebuah model pemantauan masyarakat lokal, untuk mengidentifikasi model pemerintahan tradisional atau lokal. Dalam menganalisa prioritas masalah RETA juga melakukan tinjauan-terhadap aspek-aspek tertentu.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh RETA:

- Membuat gambaran singkat tentang proses perencanaan yang diseleksi oleh masyarakat tingkat basis;
- Menguji hubungan yang ekstensif antara keluarga dan komunitas. Studi kasus Fiji dan perbandingan hubungan keluarga dengan masyarakat tradisional, serta ras-ras campuran di Fiji; merupakan isu-isu yang muncul dari dari perencanaan komunitas;
- Melihat hukum tradisional melawan undang-undang (hukum yang dibuat oleh parlemen). Studi kasus dari Vanuatu, sebuah perbandingan model pemerintah pada tingkat komunitas, perencanaan komunitas dan sebuah gambaran dari perbedaan dan penyesuaian menuju pemerintah modern.
- Melengkapi proses yang perencanaan di bawah RETA, menganalisa isu yang diangkat oleh masyarakat desa.

Presentasi ini secara serius dikomentari oleh delegasi dari Vanuatu, yang mengatakan bahwa model semacam ini tidak dapat dilaksanakan di Vanuatu, karena kondisi dan situasi di Vanuatu berbeda dari kondisi di Fiji.

Sebagai bagian dari presentasi oleh Direktur FSPI, lokakarya juga mendengarkan perspektif dari delegasi Papua Nugini, yang lebih memfokuskan pada pemberantasan korupsi, karena korupsi di Papua Nugini merupakan masalah besar dan hampir semua komponen masyarakat sipil memfokuskan diri pada pemberantasan korupsi. Selain NGO, media juga mendirikan sebuah Dewan Media yang fokus pada pemberantasan korupsi.

Phil Bowen: Menejemen Keuangan

Sektor publik tentang manajemen keuangan mendapat komentar dari Australia oleh Phil Bowen, Wakil Sekretaris Jenderal, Menejer Departemen Anggaran, Departemen Keuangan dan Administrasi di Australia, menyampaikan idenya mengenai manajemen keuangan di dalam sektor publik, termasuk beberapa pendorong untuk perubahan:

- Menambah pemantauan
- Ukuran-ukuran pertanggungjawaban yang jelas
- Mengurangi pengeluaran pemerintah
- Lebih akurat dalam keterbukaan keuangan dalam laporan anggaran.

Penilaian terhadap Pemerintahan suatu Negara

Setelah makalah dari Phil Bowen, Bank Pembangunan Asia mempresentasikan sebuah ide mengenai “*Country Governance Assessment (CGA)* atau Penilaian terhadap Pemerintahan suatu Negara.” Terdapat dua tujuan yang terdapat dalam CGA: *Pertama*, kualitas sebuah pemerintah dapat dievaluasi oleh kualitas dari proses yang digunakan dalam lembaga-lembaga negara. *Kedua* mengidentifikasi dimensi-dimensi pemerintah yang akan menguntungkan dari perbaikan-perbaikan yang ada. Metodologi dari CGA adalah “*Good Governance*” berarti “lembaga-lembaga yang baik” akan mendapatkan dukungan publik. Kerangka dasar dari CGA meliputi:

Administrasi Publik: dalam administrasi publik harus terdapat evaluasi terhadap kejelasan konstitusi dalam pemisahan kekuasaan, dan juga harus terdapat evaluasi terhadap dampak dari struktur hirarki tradisional. Evaluasi terhadap kemampuan pemahaman yang cukup mengenai sistem pemilihan umum dan hak-hak kewarganegaraan, evaluasi terhadap kelalaian parlemen, karena hal itu merupakan sebuah kelemahan, evaluasi terhadap kelemahan analisa pembangunan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, evaluasi terhadap kemampuan untuk memahami partisipasi masyarakat.

Menejemen Keuangan Publik: dalam hal menejemen keuangan publik ini akan melibatkan sebuah perbaikan dalam menejemen keuangan dan pengumpulan pendapatan dan juga administrasi. Beberapa Negara-Negara Anggota Pembangunan Pasifik (*Pacific Development Member Countries*) mengadopsi ide-ide dasar anggaran untuk dilaksanakan, tetapi selama ini sulit bagi mereka untuk mengerti dan menerapkan konsep tersebut. Walaupun beberapa negara anggota telah mencoba untuk melaksanakan Kerangka Kerja Pengeluaran untuk jangka menengah,

tetapi isu kualitas dan kesinambungannya dipertanyakan, dan tidak ada mekanisme resmi untuk mengumpulkan dan masukan secara bersama-sama dari masyarakat sipil dalam proses anggaran. Menejemen keuangan publik harus mencatat elemen-elemen berikut ini:

Kerangka Hukum dan regulasi: Pada umumnya, kerangka kerja ini lemah dan belum berkembang, aturan-aturan regim sangat monopolistik, kurangnya kemampuan, penyusunan draft-draft perundang-undangan tidak didukung oleh keakuratan petunjuk-petunjuk kebijakan, lemahnya kekuatan dari pihak kepolisian dalam pemantauan korupsi, juga lemahnya kemampuan mereka untuk melaksanakan investigasi-investigasi untuk penghukuman.

Sistem Peradilan: sistem peradilan harus selalu independen, bebas dari korupsi dan cukup disediakan sumber daya untuk memastikan tercapainya keadilan.

Masyarakat Sipil: kebebasan mendapatkan informasi, berbicara dan berasosiasi yang dijamin di dalam konstitusi; bagi LSM, keahlian advokasi tidak cukup, khususnya dalam ruang lingkup keuangan, oleh karena itu tidak cukup hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dimana semuanya menjadi tolak ukur; masyarakat sipil dari berbagai sektor yang berbeda di Pasifik mempunyai kekuatan yang berbeda.

Presentasi dari Timor Lorosa’e

Pada hari terakhir lokakarya, setiap delegasi masing-masing negara diminta untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di negara mereka. Augusto Soares Barreto dari Timor Lorosa’e mengatakan bahwa di Timor Lorosa’e, persoalan “*Good Governance*”, atau korupsi, atau nepotisme bukanlah persoalan yang besar. Di Timor Lorosa’e, roda administrasi pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (NDP). Dalam usahanya untuk melaksanakan NDP, pemerintah menemukan kurangnya ketrampilan para pegawai negeri, dan peningkatan kemampuan sangat dibutuhkan di Timor Lorosa’e. Contoh, ketrampilan dasar komputer.

Kesimpulan

Dari lokakarya regional kedua tentang “*Good Governance*”, Bank Pembangunan Asia memberikan perhatian yang besar terhadap negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Kami juga menyadari bahwa persoalan korupsi, kurangnya keterbukaan, dan pertanggungjawaban merupakan persoalan yang serius di beberapa negara di Asia Pasifik. Namun, jika kita menganalisa konsep-konsep yang ditawarkan oleh Bank Pembangunan Asia dengan sempurna seperti CGA, kadang-kadang konsep ini tidak menunjukkan semangat *Good Governance* itu sendiri. Sebagai contoh adalah salah satu poin di atas yang mengatakan “*tidak ada mekanisme resmi untuk mengumpulkan ide-ide dari masyarakat sipil mengenai proses anggaran*”; komentar tersebut menimbulkan tanggapan serius dari beberapa peserta lokakarya, yang mempertanyakan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses tersebut. Jika Bank Pembangunan Asia benar-benar ingin melaksanakan “*Good Governance*”, mengapa Bank Pembangunan Asia tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses penyusunan anggaran? Dalam hal konsultasi dengan masyarakat sipil, hingga sekarang masih belum jelas, apakah mekanisme konsultatif dilaksanakan di Timor Lorosa’e. ❖

Lowongan Kerja

La'o Hamutuk sedang mencari seseorang untuk bekerja setengah hari sebagai staff, dan pekerjaannya fokus pada Finances. Keahliannya: punya pengalaman di bidang itu selama setahun, berketrampilan English Komputer. Jika ada minat tolong kirim CV, sebuah surat analisis anda mengenai situasi perkembangan Timor Lorosaé, dan dua orang menjadi saksi. bagi yang berminat tolong kirim CV ke alamat kami.

(Batas waktu lamaran 10 Desember 2003)

Dengarkan Program Radio La'o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainya dalam bahasa Tetum dan Indonesia:

Setiap hari Sabtu pukul 11.00 pagi
di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.

Siapa di La'o Hamutuk?

Staf La'o Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Selma Hayati, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Charles Scheiner, João Sarmento, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

Gambar: Cipriano Daus

Penerjemah: Xylia Ingham

Dewan Penasehat: Maria "Micato" Domingas Alves, Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Guna mendorong para pemilik modal di bidang proyek-proyek infrastruktur yang tidak menarik pemerintah dari negara-negara berkembang dapat melakukan beberapa hal. Mereka dapat menaikkan harga untuk meningkatkan nilai potensial laba. Di Buenos Aires (Argentina), dan Manila (Filipina), pemerintah menaikkan harga air dan listrik untuk menarik para pemilik modal ke arah swastanisasi. Mereka dapat juga memisahkan perusahaan-perusahaan sektor publik ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian menjual bagian-bagian yang paling menguntungkan sementara mereka tetap mempertahankan bagian-bagian lainnya yang tidak cepat mendatangkan keuntungan. Di Guinea dan Pantai Gading, para pemerintah berhasil menjual bagian-bagian yang paling menguntungkan dari perusahaan-perusahaan air umum, yang bertanggungjawab atas rekening dan meteran pemakaian air. Tetapi, perusahaan-perusahaan swasta tidak membeli bagian-bagian lainnya, yang terpaksa harus ditanggung kerugiannya oleh pemerintah.

Untuk menanam modal perusahaan-perusahaan swasta mencari jaminan-jaminan dari para pemerintah bahwa mereka dapat membuat keuntungan. Jaminan 'ambil atau bayar' ini berarti bahwa perusahaan sektor swasta akan membangun suatu pelayanan, seperti pembangkit listrik dan mengambil semua hasil dari pelayanan tersebut untuk jangka waktu 20 hingga 30 tahun dan kemudian menyerahkan kembali pelayanan tersebut kepada pemerintah. Kesepakatan-kesepakatan seperti ini telah menciptakan masalah-masalah besar bagi negara-negara berkembang seperti Filipina dan Vietnam. Di India, pemerintah terpaksa membayar kepada perusahaan Amerika yang jahat, *Enron*, bagi masyarakat di negara bagian *Mahashtra* yang tidak mampu membayar listrik dari pembangkit listrik *Enron-Dahbol*. Dalam beberapa kasus seperti pembangkit listrik *Kipevu* di Kenya yang didukung oleh Perusahaan Keuangan Internasional, bagian dari Kelompok Bank Dunia, Pemerintah Kenya terpaksa setuju membayar 140 persen dari apa yang dibutuhkan ke dalam suatu rekening bank yang berbeda untuk menjamin para penanam modal termasuk Bank Dunia untuk mendapatkan uang mereka. Dalam kasus-kasus ini negara-negara berkembang yang harus menanggung kerugian, bukan para penanam modal yang diberi jaminan untuk mengeduk keuntungan dari kaum miskin. Hal ini bukanlah pembangunan atau pengurangan kemiskinan. Ini namanya eksploitasi.

Satu-satunya batas eksploitasi ialah peraturan pemerintah. Tetapi para pemerintah seringkali tidak mampu mengatur sektor-sektor yang diswastakan karena pengaturan tersebut diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang sangat kuat dan kaya. Terdapat sedikit sekali pemerintah yang dapat melakukannya, khususnya di negara-negara berkembang yang baru memiliki sistem kelembagaan dan pengaturan yang baru. Di sejumlah negara yang sistem pengaturannya relatif kuat seperti

Inggris sejumlah perusahaan swasta yang telah dibawa masuk ke dalam sektor publik dapat saja menarik diri sesuai dengan batasan peraturan sehubungan dengan jumlah uang yang harus dihasilkan.

Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia menyatakan bahwa swastanisasi mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sektor swasta, tetapi tidak jelas bagaimana menjual pelayanan-pelayanan pada sektor publik, seringkali, kepada perusahaan-perusahaan transnasional akan melakukan hal ini. Pada umumnya, sektor-sektor swasta mencoba mencekik persaingan dan mengelak dari peraturan pemerintah demi memaksimalkan keuntungan. Lembaga Keuangan Internasional juga mengatakan bahwa swastanisasi akan meningkatkan penanaman modal. Akan tetapi bagi banyak negara berkembang, misalnya di Afrika, sedikit penanam modal tertarik dalam swastanisasi, sehingga pemerintah harus menawarkan konsesi seperti seperti pengurangan pajak untuk menarik para penanam modal. Swastanisasi selayaknya memungkinkan pemerintah mengalokasikan uang dalam pengurangan kemiskinan dari pada harus menanam modal di bidang infrastruktur, tetapi seringkali pemerintah harus menanggung beban keuangan lebih lanjut seperti menjamin keuntungan suatu perusahaan tertentu atau memelihara kerugian yang membuat bagian-bagian perusahaan negara yang pada awalnya dapat menghasilkan uang dijual dengan harga murah.

Perusahaan-perusahaan swasta ingin memaksimalkan keuntungan dan mempunyai motivasi yang rendah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Air, listrik, perawatan kesehatan dan pendidikan bukanlah komoditi-komoditi yang layak dipasarkan. Air bersih, perawatan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang mana rakyat berhak atas kebutuhan dasar tersebut.

Di Timor Lorosa'e, sebuah perusahaan swasta asing, *Macau Electricity Cooperation (CEM)* telah diberikan konsesi untuk mengelola Listrik Timor Lorosa'e (EDTL) untuk jangka waktu tiga tahun dan perusahaan lain yang terpisah telah dikontrak untuk memasang meteran listrik yang dibayar di muka. EDTL belum diswastanisasikan dimana semua asset akan dikembalikan kepada pemerintah setelah tiga tahun.

Timor Lorosa'e, seperti banyak negara lain di dunia mempunyai sedikit uang untuk menanamkan modalnya dalam penyediaan listrik, air, dan pelayanan pokok lainnya dan sehingga negara ini harus menganalisa semua pilihan yang tersedia untuk menangani masalah ini. Masyarakat Timor Lorosa'e harus memutuskan apakah publik dan yang terbaik yang disediakan oleh pemerintah dan apakah yang swasta dan terbaik disediakan oleh sektor swasta dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta negara-negara penyandang dana harus membiarkan masyarakat Timor Lorosa'e melakukannya. ❖

Orang membutuhkan barang-barang, seperti makanan dan pakaian, serta pelayanan penting, seperti air, listrik, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Salah satu isu yang paling kontroversial dalam dekade sekarang ini adalah bagaimana barang-barang dan pelayanan ini harus disediakan. Apakah yang lebih baik, disediakan oleh pasar atau sektor swasta, dan apakah yang harus disediakan oleh pemerintah atau sektor publik.

Di negara-negara berkembang, Pemerintah telah menjual banyak perusahaan dan pelayanan yang pada awalnya dimiliki oleh publik kepada perusahaan-perusahaan swasta selama dua dekade. Sekarang banyak orang yang membeli air, listrik atau gas dari perusahaan swasta, yang membuat keuntungan bagi perusahaan. Jasa-jasa lainnya, seperti telekomunikasi, pengumpulan dan pengangkutan sampah juga disediakan oleh sektor swasta, yang juga semakin terlibat dalam penyediaan pendidikan dan perawatan kesehatan serta bahkan penjara dan kebijakannya. Model suatu negara yang pelayanan publiknya diswastanisasi seperti air dan listrik dipaksakan terhadap negara-negara berkembang oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), yang menempatkan syarat-syarat pada pinjamannya. Hal ini dapat juga didukung dan dipromosikan oleh negara-negara donor yang besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang. Tekanan seperti ini memberikan ruang yang sangat kecil kepada rakyat untuk mencari alternatif.

Dari Afrika hingga Asia dan dari Amerika Selatan dan Tengah hingga Karibia banyak terdapat kegagalan dari swastanisasi sektor publik. Tidak ada bukti akhir bahwa swastanisasi jasa-jasa publik dapat mengarahkan pelayanan yang lebih baik di negara-negara maju atau lebih pentingnya negara berkembang, tetapi hal ini lebih sering mengarah pada harga-harga yang lebih tinggi. Republik Dominika mengswastakan sektor listriknya dan pelayanan semakin memburuk dan harganya sekarang mendekati yang tertinggi di dunia. Pemerintah Bolivia menghadiahkan konsesi 40 tahun pengelolaan sistem air dan sanitasi *Cochamba* kepada *Agua del Tunari*, sebuah konsorsium yang dikontrol *Bechtel*, sebuah perusahaan infrastruktur dari Amerika Serikat. Kenaikan harga air yang tak terjangkau menyebabkan rangkaian demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan.

Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia mengatakan mereka menggunakan energi yang bermotivasi keuntungan dari sektor swasta bagi kebaikan sosial di negara-negara berkembang. Pemikiran ini merupakan suatu pemikiran yang tidak waras dan lebih-lebih sinis ketika perusahaan-perusahaan yang biasanya membeli sektor-sektor publik adalah perusahaan besar, kaya dan berkuasa yang labanya diperoleh dari pemerasan terhadap kaum miskin. Bisa saja benar bahwa dalam suatu persaingan pasar, perusahaan-perusahaan swasta harus

efisien untuk memperoleh laba dan dengan demikian dapat terus hidup. Akan tetapi, suatu pasar yang kompetitif tidak ada di bidang penyediaan air bersih, listrik, perawatan kesehatan, pendidikan di dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Timor Lorosa'e.

Lagi pula pelayanan sektor publik seperti air dan listrik di negara-negara berkembang biasanya merupakan usulan yang tidak menarik bagi perusahaan-perusahaan di sektor swasta. mereka tersebut membutuhkan modal awal yang besar yang berarti bahwa akan membutuhkan waktu panjang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba dari modal mereka. Jika mereka tidak mendapatkan laba mereka tidak akan menanam modal. Pabrik Inggris *Biwater* menarik diri dari proyek air di Zimbabwe karena masyarakat setempat terlalu miskin untuk membayar harga minimum air yang ditetapkan oleh *Biwater*; nilai labanya tidak cukup besar.

(Lanjutan ke halaman 19)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.